



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP TUAL TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 21 Januari 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sosteres, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;

9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai NKO 106,50 Selama Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan perhitungan atas capaian 21 indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) dengan target 82 dan capaian sebesar 100;
2. Tingkat akurasi dan validitas hasil Intelijen Kelautan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 75 dan capaian sebesar 100;
3. Tingkat akurasi dan validitas hasil Intelijen Kelautan Intelijen Perikanan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 75 dan capaian sebesar 100;
4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 82 dan capaian sebesar 100;
5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha Perikanan UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) dengan target 82 dan capaian sebesar 100;
6. Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 92 dan capaian sebesar 96,80;
7. Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 92 dan capaian sebesar 95,00;
8. Persentase Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%), dengan target 100% dan capaian 100%
9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks), dengan target 81 dan capaian sebesar 81;
10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks), dengan target 81 dan capaian sebesar 81;
11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks), dengan target 94 dan capaian sebesar 100;

12. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai), dengan target 71,5 dan capaian sebesar 91,36;
13. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai), dengan target 92 dan capaian sebesar 93,39;
14. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 86 dan capaian sebesar 83,22;
15. Penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 86 dan capaian sebesar 87,5;
16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%) dengan target 100 % dan capaian sebesar 100 %;
17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tidak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 95 % dan capaian sebesar 100 %;
18. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 88,5 dan capaian sebesar 99,01;
19. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 75 dan capaian sebesar 86,5;
20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (Inovasi) dengan target 1 dan capaian sebesar 84,72;
21. Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) target 70 dan capaian sebesar 76,62 ;

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan OMSPAN sebesar **91,91%** atau sebesar Rp **32,828,943,648,-** (*Tiga puluh Dua miliar Delapan ratus Dua puluh Delapan juta Sembilan ratus Empat puluh tiga ribu Enam ratus Empat puluh Delapan rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**35.716.696.000,-** (*Tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), dimana terdapat PNBPN pada TA. 2025 sebesar Rp**6.606.165.000,-** (*enam miliar enam ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*). Pagu yang bersumber dari PNBPN hanya dapat dimanfaatkan melalui PNBPN Tahap I sebesar Rp**4.170.354.000,-** pada tanggal 04 Juli 2025, sehingga terdapat Pagu PNBPN sebesar Rp **2.435.811.000** yang tidak dapat direalisasikan. Jika dihitung berdasarkan pagu existing tanpa PNBPN dan AA yang belum dapat digunakan

maka pagu Pangkalan PSDKP Tual sebesar RRp**29,113,531,000** sehingga realisasi selama tahun 2025 sebesar **99,99 %** Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan sehingga pencapaian kinerja pada tahun kedepan dapat lebih optimal.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Maksud dan Tujuan	13
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13
D. Data Umum Organisasi	14
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	19
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2025.....	20
B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2020 – 2025.....	22
C. Program Kerja Pengawasan SDKP.....	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
E. Pengukuran Capaian Kinerja	23
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	27
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Tahunan Tahun 2025	27
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan.....	27
B. Analisis Pencapaian Kinerja	29
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif efektif	29
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Intelijen Kelautan Secara efektif.....	30
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	35
4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	37
5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif.....	42

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	81
7. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penyediaan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif sesuai ketentuan	90
8. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	92
C. Realisasi Anggaran.....	108
BAB IV	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran dan Rekomendasi	109

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada	18
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja.....	18
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025.....	24
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025.....	29
Tabel 6 Capaian IK 1.....	31
Tabel 7 Perbandingan IKU 1 antar UPT	31
Tabel 8 Capaian IK 2.....	36
Tabel 9 Perbandingan IKU 2 antar UPT	36
Tabel 10 Capaian IK 3	39
Tabel 11 Perbandinagn IKU 3 antar UPT	39
Tabel 12 Tahapan Pemeriksaan IK 4.....	41
Tabel 13 Capaian IK 4	42
Tabel 14 Perbandingan IKU 4 antar UPT	42
Tabel 15 Rekap pemeriksaan SDK Tahunan.....	42
Tabel 16 Perhitungan efesiensi efisiensi sumber daya kelautan.....	44
Tabel 17 Rekap Pengawasan Pencemaran	45
Tabel 18 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual.....	46
Tabel 19 Data Pengawasan KKPN	46
Tabel 20 Rekap Pengawasan PRL	48
Tabel 21 Rekap pengawasan PWP3K	51
Tabel 22 Tahap Pemeriksaan IKU 5 antar UPT	53
Tabel 23 Capaian IK 5	54
Tabel 24 Perbandingan IKU 5U antar UPT.....	54
Tabel 25 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan	54
Tabel 26 Perhitungan fisiensi penggunaan sumber daya perikanan	56
Tabel 27 Rekapitulasi penerbitan SLO Tahunan.....	56
Tabel 28 Pengawasan penangkapan kapal perikanan.....	57
Tabel 29 Rekap Pengawasan Pengolahan.....	58
Tabel 30 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran.....	59
Tabel 31 Rekap pengawasan budidaya	59
Tabel 32 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi.....	60
Tabel 33 Tahapan pemeriksaan IKU 6	67
Tabel 34 Capaian IK 6	68
Tabel 35 Perbandingan IKU 6 antar UPT	68
Tabel 36 Perhitungan Capaian IKU 6.....	69
Tabel 37 Pemeriksaan IK 7	72
Tabel 38 Capaian IK 7	72
Tabel 39 Perbandingan IKU 7 antar UPT	73
Tabel 40 Realisasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual.....	74
Tabel 41 Capaian IK 8	75
Tabel 42 Perbandingan IKU 8 antar UPT	75
Tabel 43 kriteria indeks sanksi adm.....	79

Tabel 44	Capaian IK 9	79
Tabel 45	Perbandingan IKU 9 antar UPT	80
Tabel 46	Rekap pengenaan sanksi administratif SDK berdasarkan ekspose.....	81
Tabel 47	Rekap pengenaan sanksi administratif SDP berdasarkan ekspose.....	81
Tabel 48	Nilai efisensi sanksi administratif.....	86
Tabel 49	Rekapitulasi SPKP.....	87
Tabel 50	Capaian IK 10	87
Tabel 51	Perbandingan IKU 10 antar UPT	87
Tabel 52	Kriteria Indeks	87
Tabel 53	Capaian IK 11	89
Tabel 54	Perbandingan IKU 11 antar UPT	90
Tabel 55	Capaian IK 12	93
Tabel 56	Perbandingan IKU 12 antar UPT	93
Tabel 57	Capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual.....	94
Tabel 58	Capaian IK 13	95
Tabel 59	Perbandingan IKU 13 antar UPT	95
Tabel 60	Capaian IK 14	96
Tabel 61	Perbandingan IKU 14 antar UPT	96
Tabel 62	Capaian IK 15	97
Tabel 63	Perbandingan IKU 15 antar UPT	98
Tabel 64	Capaian IK 16	99
Tabel 65	Perbandingan IKU 16 antar UPT	99
Tabel 66	Capaian IK 17	98
Tabel 67	Perbandingan IKU 17 antar UPT	98
Tabel 68	Capaian IK 18	100
Tabel 69	Pebandingan IKU 18 antar UPT.....	102
Tabel 70	Capaian IK 19	103
Tabel 71	Pebandingan IKU 19 antar UPT.....	104
Tabel 72	Capaian IK 20	105
Tabel 73	Perbandingan IKU 20 antar UPT	105
Tabel 74	Capaian IK 21	106
Tabel 75	Perbandingan IKU 21 antar UPT	107
Tabel 76	Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2025.....	109
Lampiran.....		110

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual	16
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	17
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual	19
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual.....	27
Gambar 5 Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS di Sorong.....	31
Gambar 5 Pelaksanaan Intelijen Kelautan.....	35
Gambar 7 Pelaksanaan Intelijen Perikanan.....	38
Gambar 8 Pengawasan PRL pada KJA Rajawali Laut Timur	50
Gambar 9 Pengawasan PWP3K	51
Gambar 10 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan	56
Gambar 11 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan ikan	57
Gambar 12 Pengawasan pendistribusian ikan	58
Gambar 13 Pengawasan budidaya.....	58
Gambar 14 Pengawasan jenis ikan yang dilindungi.....	64
Gambar 15 Gelar operasi kapal pengawas.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengawasan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Pangkalan PSDKP Tual;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyak UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang pengelolaan sumber daya kelautan

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
- e. Ketidaksihinggaan Lokasi pemanfaatan ruang laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka untuk membantu tugas Kepala Subbagian Umum maka dibentuklah tim kerja pada lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri atas

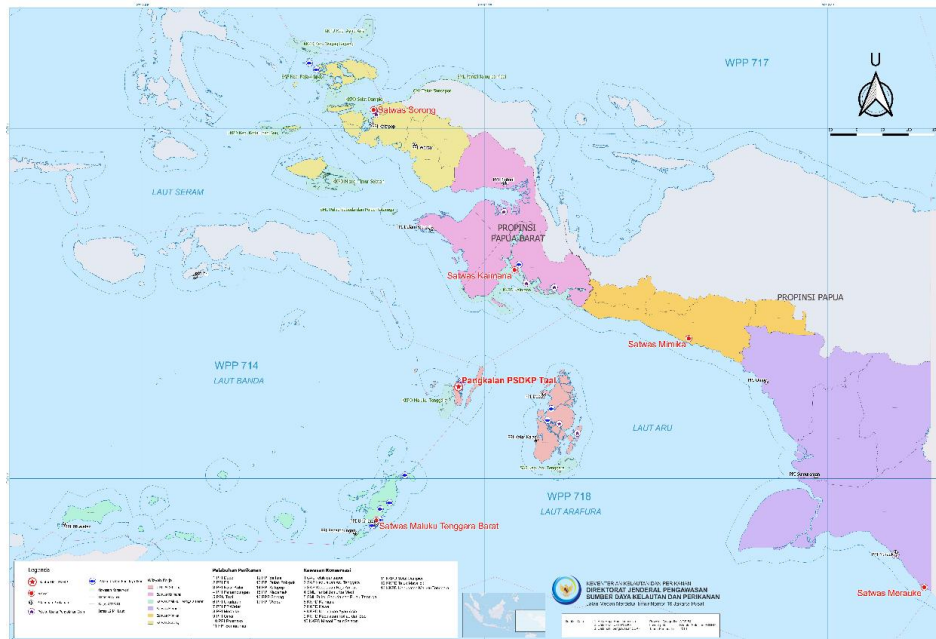
1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk

c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual membawahi 5 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Wilker PSDKP Dobo
- 2) Wilker PSDKP Warabal
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)
 - Wilker PSDKP Kisar
- 4) Satuan Pengawasan SDKP Sorong
 - Wilker PSDKP Sorong Selatan
 - Wilker PSDKP Raja Ampat
- 5) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana
 - Wilker PSDKP Fak Fak
 - Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
 - Wilker PSDKP Avona
- 6) Satuan Pengawasan SDKP Mimika
- 7) Satuan Pengawasan SDKP Merauke
 - Wilker PSDKP Wanam
 - Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data sebaran kapal pengawas, *speedboat* pengawas, RIB, dan jetski sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat
8	Napoleon 049	12 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual

Armada Kapal Pengawas, *Speedboat* dan RIB siap operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Tahun 2025 sebanyak 140 orang yaitu terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 78 orang, PPPK sebanyak 49 orang dan PJLP sebanyak 13 untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PJLP	Jumlah (Orang)
1	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	25	22	11	58
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	3	4	-	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	-	-	-	-
2	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	9	3	-	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	1	-	3
3	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	7	2	1	9
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-

4	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	2	2	-	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	3	3	1	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	-	0
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	3	-	5
6	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	3	2	-	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	KP. Hiu Macan 06	11	3	-	14
8	KP. Hiu 14	8	3	-	11
9	KP. Macan Tutul 01	-	1	-	1
10	Tugas Belajar	3	-	-	3
	Total	78	49	13	140

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Gambar: 3 Sistematika Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025 - 2029; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2025; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025 - 2029 Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama

- berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2025 – 2029

UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan dengan cara memadukan kebijakan pusat dan UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2025 – 2029 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
SK. 2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		03	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan (Nilai)	75
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	04	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Nilai)	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	05	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	06	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92

		07	Indeks operasi speedboat Pengawas (indeks)	92
SK.6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	08	Persentase Pemerlihaaran dan Perawatan Sarana dan Prasarana pengawasan SDKP Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100 %
SK. 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
SK. 8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
SK. 9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100 %
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95 %
		18	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	1		

		21	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70
--	--	----	---	----

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Tahunan Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IK dan 10 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 106,50 % untuk tahun 2025, capaian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 21 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Tahunan Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2025	DESEMBER	DESEMBER	
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						120	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	100	120
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						120	
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	100	120
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	100	120
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan						100	
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan						100	
5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						104,24	
6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	96,8	105,22
7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	95	103,26
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						100	
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						100	
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	100
10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	100
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						106,38	
11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	100	106,38
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						107,88	
12	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	71,5	91,36	120
13	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	76,63	109,47
14	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	93,39	101,51
15	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	83,22	102,74
16	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	87,5	101,74
17	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	95	100	105,26
19	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,5	88,5	99,01	111,88
20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	86,5	108,13
21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi) Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	84,72	120

Pada tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual menetapkan 21 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 21 IK telah dilaksanakan dengan kriteria 15 IKU dengan predikat baik walaupun IK IKPA tidak mencapai target akan tetapi capaiannya masih dalam kategori baik dan, 6 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Realisasi anggaran pada tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan OMSPAN sebesar **91,91%** atau sebesar **Rp32.828,943,648,-** (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dari alokasi anggaran **Rp35.716.696.000** (*Tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), dimana terdapat PNPB pada TA. 2025 sebesar **Rp6.606.165.000,-** (*enam milyar enam ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*). Pagu yang bersumber dari PNPB hanya dapat dimanfaatkan melalui PNPB Tahap I sebesar **Rp 4.170.354.000,-** pada tanggal 04 Juli 2025, sehingga terdapat Pagu PNPB sebesar **Rp2.435.811.000** yang tidak dapat direalisasikan. Jika dihitung berdasarkan pagu existing tanpa PNPB dan AA yang belum dapat digunakan maka pagu Pangkalan PSDKP Tual sebesar **29.110.531.000,-** sehingga realisasi selama tahun 2025 sebesar **99,99%**.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU	0	17.363,947,000	128,000,000	0	0	0	0	0	0	17.489,947,000
		REALISASI	0,00%	14,929,891,941 (85,98%)	125,826,321 (99,88%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,055,718,262 (86,08%)
		SISA	0	2.434,055,059	173,679	0	0	0	0	0	0	2.434,228,738
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU	0	67,841,000	0	0	0	0	0	0	0	67,841,000
		REALISASI	0,00%	67,835,022 (99,99%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,835,022 (99,99%)
		SISA	0	5,978	0	0	0	0	0	0	0	5,978
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU	0	621,337,000	0	0	0	0	0	0	0	621,337,000
		REALISASI	0,00%	621,327,470 (100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	621,327,470 (100,00%)
		SISA	0	9,530	0	0	0	0	0	0	0	9,530
4	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU	12,515,642,000	4,991,509,000	30,420,000	0	0	0	0	0	0	17,537,571,000
		REALISASI	12,514,985,727 (99,99%)	4,538,857,817 (90,93%)	30,419,550 (100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,084,062,894 (97,41%)
		SISA	656,273	452,651,383	450	0	0	0	0	0	0	453,508,108
GRAND TOTAL		PAGU	12,515,642,000	23,044,634,000	156,420,000	0	0	0	0	0	0	35,716,696,000
		REALISASI	12,514,985,727 (99,99%)	20,157,712,050 (87,47%)	156,245,871 (99,89%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	32,828,943,648 (91,91%)
		SISA	656,273	2,886,921,950	174,129	0	0	0	0	0	0	2,887,752,352

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 21 Indikator kinerja Utama yang telah dicapai oleh Pangkalan PSDKP Tual pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Sasaran kegiatan pertama menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)"

a. IKU 1: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Tual. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Formula:

$$x = \frac{(a+b+c)}{100} \times 100\%$$

Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
 a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)
 b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
 c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Selama tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual tidak dapat melaksanakan kegiatan Pokmaswas faktor penyebabnya adalah karena keterbatasan pagu anggaran mengalami pemotongan sehingga dana untuk kegiatan pembinaan tidak tersedia karena di fokuskan pada kegiatan inti seperti pengawasan laut penegak hukum dan dukungan logistik yang bersifat mendesak namun dengan keterbatasan anggaran yang tidak tersedia Pangkalan PSDKP Tual melalui Satwas SDKP Sorong dapat melaksanakan kegiatan Pokmaswas di Yerusel Kampung Arar

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya sehingga memperoleh capaian atas IKU ini sebesar **100** dengan persentase **120 %** dari target **82**, capaian tersebut dikarenakan semua tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam manual indikator kinerja. Perencanaan, pendataan keaktifan POKMASWAS dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan.

$$x = \frac{a + b + c}{100} \times 100\%$$

$$x = \frac{20 + 30 + 50}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berikut kami sajikan capain dalam bentuk tabel

Tabel 6 capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	82	100	100	100	-	-	-

Tabel 7 Perbandingan IKU 1 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Kegiatan pembinaan POKMASWAS dilaksanakan di Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di Yerusel Kampung Arar pada tanggal 02 November 2025, dengan total peserta sebanyak 18 orang dengan rincian sebanyak 18 orang yang terdiri dari Aparat Kampung Arar, Bhabinkantibmas dan Masyarakat Nelayan Kampung Arar. Kegiatan berjalan dengan khidmat dengan materi yang dibawakan oleh

- Elisa Bakula, A.Md, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Pertama Ditjen PSDKP) dengan materi "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Jika kita melihat tabel yang telah disajikan maka IKU 1 merupakan IKU yang baru dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Selama tiga tahun mengemban IKU tersebut capaian tetap dipertahankan dengan nilai yang maksimal. Capain IKU pembinaan

POKMASWAS tidak dapat kita bandingkan dengan target renstra dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap IKU tersebut sehingga tidak relevan untuk dibandingkan.



Gambar : 5 Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS di Sorong

Analisa penyebab keberhasilan IKU 1 diantaranya;

- UPT Pangkalan PSDKP Tual melalui Satwas SDKP Sorong turut serta memantau keaktifan POKMASWAS, dengan membangun komunikasi yang intens dengan pokmaswas maupun lembaga terkait;
- Aktif membangun komunikasi dengan pusat dan daerah dalam hal ini Direktorat POA dan DKP terkait penyelenggaraan kegiatan baik pemateri dan lokasi serta mobilisasi kehadiran POKMASWAS dalam kegiatan dimaksud;
- Pangkalan PSDKP Tual merespon cepat pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diawal tahun 2025 sehingga meminimalisir adanya benturan pelaksanaan dengan kegiatan lainnya;
- Pangkalan PSDKP Tual turut mendelegasikan perwakilan ke Satwas SDKP Sorong untuk memantau dan turut serta ikut mensukseskan kegiatan pembinaan POKMASWAS.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan walaupun tidak tersedia anggaran adalah melibatkan masyarakat dalam kegiatan Bersama seperti pembersihan pantai, menanam mangrove atau patroli ringan, mengundang tokoh adat, tokoh agama atau nelayan untuk memberikan motivasi dan memperkuat legitimasi Pokmaswas, mengajak membahas aturan perikanan, larangan alat tangkap tertentu, dan pentingnya menjaga ekosistem laut. selain itu dapat menggunakan media social lokal (WhatsApp group, Facebook komunitas) untuk menyebarkan informasi pengawasan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator kinerja ini adalah dengan mengoptimalkan pendelegasian kepada petugas Satwas SDKP berperan sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah Papua Barat

Daya selain itu tantangan utama yang di hadapi adalah luasnya wilayah kerja, keterbatasan jumlah personil, serta kebutuhan untuk tetap menjaga kualitas pembinaan dan pengawasan.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Sasaran kegiatan kedua menghasilkan 2 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya;

1. tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai) Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
2. tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai) Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai);

b. IKU 2: Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual.
3. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.

Formula :

$$X = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- X : nilai Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
- Xi : nilai data intelijen kelautan
- n : jumlah operasi intelijen kelautan

1.Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94

B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan

Kredibel dan diterima	>75
Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25-75
Tidak kredibel dan ditolak	<25

Pada Tahun 205 Pangkalan PSDKP Tual baru melaksanakan kegiatan Intelijen Kelautan dengan pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual (Wilker Raja Ampat) Adapun kegiatan yang dilaksanakan berlokasi di dua tempat yaitu:

1. PT. Ocean Explorers yang beralamat di Kampung Yenwoupnor, Desa/Kelurahan Yenwaupnor, Kec. Meos Mansar, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dan PT Scubacqueando Raja Ampat yang beralamat Jl. Pulau Wai, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang bergerak di bidang pariwisata, berdasarkan kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh petugas PWP3K Pangkalan PSDKP Tual (Wilker Raja Ampat) pada tanggal 29 November 2025, dengan melakukan pengecekan lokasi dari kunjungan diperoleh informasi bahwa PT. Ocean Explorers dan telah memiliki perizinan berusaha (8120101911203) dengan KBLI 93242 (Wisata Selamat) dan KBLI 55110 (Hotel Bintang), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pengalihan Hak Sewa Menyewa Tanah antara PT. Ocean Explorers dengan pemilik hak ulayat, masih belum memiliki PKKRL alasannya pernah mengajukan draf pengajuan PKKRL hanya saja terdapat kendala pada saat terjadi pergantian manejer dimana dokumen tersebut belum di tindak lanjuti, sehingga berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen perizinan dalam hal ini adalah PKKRL pada bulan Desember 2025. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ocean Explorers telah berjalan sejak tahun 2017, kemudian usaha yang dilakukan vakum dikarenakan Covid-19; 4. PT Ocean Explorers memiliki beberapa bangunan diatas air antara lain 20 Bungalow, 1 buah restoran, 1 buah dermaga yang terdiri dari 1 bangunan spa dan 1 bangunan Divers center juga 1 buah dermaga yang berguna untuk bongkar muat Speedbot, Memiliki Armada Speedboat sebanyak 10 Unit yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari dalam menunjang usaha yang dijalankan, dan memiliki karyawan sebanyak 89 orang yang terdiri dari 83 Orang WNI dan 6 Orang WNA, dengan nilai informasi A1.
2. PT Scubacqueando beralamat di, Jl. Pulau Wai , Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dan PT Scubacqueando Raja Ampat yang beralamat Jl. Pulau Wai, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya bergerak dibidang pariwisata yang Bernama Wai Echo Resort berdasarkan kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh petugas PWP3K Pangkalan PSDKP Tual (Wilker Raja Ampat) pada tanggal 28 November 2025, dengan melakukan pengecekan lokasi dari kunjungan diperoleh informasi bahwa PT Scubacqueando telah memiliki perizinan berusaha (1503230004825) dengan KBLI 70201 (Aktivitas Konsultasi Pariwisata) KBLI 93299 (Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya) KBLI 55110 (Hotel Bintang) KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) KBLI 56101 (Restoran)

KBLI 74201 (Aktivitas Fotografi) KBLI 96122 Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pengalihan Hak Sewa Menyewa Tanah antara PT Scubacqueando Raja Ampat dengan pemilik hak ulayat, selain itu selama menjalankan kegiatan usaha PT Scubacqueando Raja Ampat belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang PKKPRL sehingga Pengawas Perikanan PWP3K meminta kepada PT. Scubacqueando Raja Ampat agar untuk segera melakukan komunikasi mengenai PKKPRL ke instansi terkait dalam hal ini Loka PSPL Sorong. PT Scubacqueando Raja Ampat memiliki beberapa bangunan diatas air antara lain 1 buah Dermaga Divers Center, 1 buah dermaga yang terdiri dari 1 bangunan Spa, 1 Bangunan sunset, 1 bangunan dapur dan 1 bangunan restoran, memiliki karyawan sebanyak 40 orang WNI, Serta Pada saat kami melakukan pemeriksaan, terdapat tamu sebanyak 8 orang WNA dan Memiliki 7 Buah Speedboat yang digunakan untuk menunjang aktifitas usaha.



Gambar : 6 Kegiatan Pengawasan Intelijen SDK

IK Intelijen Kelautan ini merupakan IKU baru yang baru berjalan sejak tahun 2025 sehingga nilainya belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya, namun berhasil dengan memenuhi tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga mendapatkan capaian sebesar **100** dengan persentase **120 %** dari **target sebesar 75 pada tahun 2025**

Tabel. 8 capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	100	-	-	-	-	-

Tabel.9 Perbandingan IK 2 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo

SK.2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	IKU. 2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	100	-	-	-	-	-
------	--	--------	--	-----	---	---	---	---	---

$$\text{Capaian IKU 2 : } x = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

$$\text{Capaian IKU 2 : } x = \sum_{i=1}^2 \frac{(200)}{2}$$

$$x = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja intelijen kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dipengaruhi beberapa faktor antara lain; perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan dukungan operasi.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, SDM yang terlatih dengan kemampuan teknis dan memahami permasalahan sesuai SOP sehingga mengurangi kesalahan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi mobile laporan cepat di lapangan, kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi mobile laporan cepat di lapangan serta Pokmaswas sebagai multiplier effect dalam pengawasan.

c. IKU 3: Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Perikanan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

1. Intelijen Perikanan ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual.
2. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi Pangkalan PSDKP Tual.
3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

Formula:

$$X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n} \times 100$$

Keterangan:

Xintl : tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

Xi : nilai akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

n : jumlah hasil intelijen perikanan

Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut

No	Kegiatan	Nilai
1	Perencanaan	0.2
2	Pengumpulan data	0.5
3	Pengolahan data	0.2
4	Penyajian	0.1

Pada Tahun 205 Pangkalan PSDKP Tual baru melaksanakan kegiatan Intelijen Perikanan dengan pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual Adapun kegiatan yanag dilaksanakan berlokasi di dua tempat yaitu di kota tual dan Maluku Tenggara Barat Saumlaki.

3. Kegiatan intelijen perikanan yang di laksanakan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan sumber informasi dari warga setempat yaitu bu Klamentina Handayani Toker (Watran), Bpk. Irenimus Naraha (Watran), Bpk. Kosmas Naraha (Watran), Ibu A. Wattimury (Taar), Bpk. Markus Resimanuk (Taar), Ibu Fitria Dahriyanto (Fiditan), Bpk Dahriyanto (Fiditan), Ibu Rukiyah (Mangon) dan Bpk. Yusuf Matdoan (Mangon), serta pengamatan dan wawancara di desa atau dusun yang menjadi target pulbaket yaitu bertempat di Dusun Watran, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan Dusun Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota dari hasil kegiatan tersebut didapatkan beberapa pelaku usaha telah memiliki izin usaha yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tual yang bergerak di bidang usaha budidaya rumput laut dan tempat empat pelaku usaha yang masih aktif perizinanya dan 14 pelaku usaha lainnya tidak aktif alasanya karena ketiadaan bibit,seragan hama serta turunya harga jual rumput laut.sehingga nillai informasi B1
4. Kegiatan Intelijen Perikanan yang dillaksanakan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual (Wilker SDKP Dobo),agen mendapatkan sumber informasi pada tanggal 12 – 14 Juni sekira pukul 10.00 WIT ada kapal motor yang diduga sebagai sarana penyelundupan teripang dari Australia Saumlaki dan Dobo agen bergerak bersama pemberi informasi di desa benjina setelah tiba disana agen Bersama pemberi informasi mualai memetakan jalur kapal yang selalu melewati kapal dari/ke Daobo dan Saumlaki kemudian bergerak menuju desa Longgar Aparah yang merupakan ujung Kepulauan Aru yang merupakan pintu masuk pertama bagi Kapal.berdasarkan pulbaket dengan metode

wawancara dan eliciting dengan salah satu kepada Operator Kapal Motor Dobo yang Bernama kevin, Beberapa Personel Polsubsek Desa Longgar, serta Koordinator Pembangunan Desa Longgar yang bernama Ramli dari hasil eliciting bahwa belum pernah melihat kegiatan tersebut ataupun mendengar walaupun ada yang menjual teripang tersebut sampai ke pengumpul namun tidak mendapat informasi yang kuat bahwa adanya penyelundupan teripang menggunakan kapal motor yang diduga sebagai sarana untuk mengangkut teripang dari/ke Australia, Saumlaki dan Dobo sehingga informasi nilai informasi B1.



Gambar : 7 Kegiatan Pengawasan Intelijen SDP

IKU Intelijen perikanan ini merupakan IKU baru yang baru berjalan sejak tahun 2025 sehingga nilainya belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya, namun berhasil dengan memenuhi tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga mendapatkan capaian sebesar **100 dengan persentase 120 %** dari **target sebesar 75 pada tahun 2025**

Tabel. 10 capaian IK 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan (Nilai)	75	100	-	-	-	-	-

Tabel.11 Perbandingan IKU. 3 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	IKU 3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan (Nilai)	100	-	-	-	-	-

$$\text{Capaian IKU 3 : } X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n} \times 100$$

$$\text{Capaian IKU 3 : } X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(1+1)}{2} \times 100$$

$$X_{intl} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dipengaruhi beberapa faktor antara lain; ditopang oleh kombinasi SDM yang memahami konteks lokal, disiplin SOP, teknologi monitoring, jejaring komunitas dan instansi, serta siklus umpan balik operasional.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, SDM yang terlatih dengan kemampuan teknis dan memahami permasalahan sesuai SOP sehingga mengurangi kesalahan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi mobile laporan cepat di lapangan Serta Pokmaswas sebagai multiplier effect dalam pengawasan.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Sasaran kegiatan ke tiga menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu " Indeks penyelesaian pelaku usaha sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

d. IKU 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

IKU Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- X_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel.12 Tahapan pemeriksaan IKU 4

No.	Kegiatan	Nilai	Ouput
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	
No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tabel.13 Rekap Pemeriksaan SDK Tahunan

No.	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Unit/Pelaku Usaha Yang Terperiksa PANGKALAN PSDKP TUAL SDK TAHUN 2025										Jumlah Pelaku Usaha		
		KKPN		PWP3K		PRL		INTELIDEN		PENCEMARAN		Taat	Tidak Taat	Total
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat			
1	Pangkalan PSDKP Tual					4						4	0	4
2	Wilker PSDKP Dobo											0	0	0
3	Satwas PSDKP Sorong					6	5			1		9	5	14
4	Wilker PSDKP Raja Ampat	18	3		3	1			2			19	8	27
5	Satwas PSDKP Merauke											0	0	0
6	Satwas PSDKP Kaimana					1						1	0	1
7	Wilker PSDKP Fak-Fak											0	0	0
8	Satwas PSDKP Mimika					1						1	0	1
9	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat					1						1	0	1
Jumlah		18	3	0	3	14	5	0	2	1	0	35	13	48
		21		3		19		2		1		48		

$$\text{Capaian IKU 4} = \frac{2.100+3.00+19.00+2.00+3.00}{48} = \frac{48.00}{48} = 100$$

$$\text{Capaian IKU 4} = \frac{TWI+TWII+TWIII+TIV}{4} = \frac{100+100+100+100}{4} = \frac{400}{4} = 100$$

Tahun 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target tahunan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

tabel berikut:

Tabel.14 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100	-

Tabel.15 Perbandingan IK 4 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	IKU.4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Tual (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. *Briefing* rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan

optimal, kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik pada apel bagi ataupun pertemuan khusus;

2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Efisiensi penggunaan sumber daya kelautan pada indikator kinerja ini cukup signifikan dimana capaian diatas 100 % dengan nilai efisiensi sebesar 0,003 % yang akan disajikan pada tabel 16, efisiensi dapat optimal dikarenakan ;

Sampai dengan akhir tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 lembaga. Pengawasan sumber daya kelautan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 100% atau sebesar Rp.267,440,142,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp267,449,000- dengan capaian output sebesar 48 atau 100 % dari target yaitu 40 dengan nilai efisiensi sebesar 0,003 % sebagaimana kami sajikan dalam tabel di bawah.

- Melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan pada satu lokasi yang sama apabila ditemukan lebih dari satu objek pengawasan;
- Memilih rute pengawasan yang secara jarak berdekatan dengan unit usaha yang lain sehingga dalam satu perjalanan dapat memperoleh lebih dari satu unit usaha yang diperiksa.

Tabel.16 Perhitungan efisiensi Sumber Daya Kelautan

No	Output Program	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.QIC 001	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	40	48	100%	267.449.000	267.440.142	267.449.000	8.858
TOTAL					267.449.000	267.440.142	267.449.000	8.858

Catatan : Nilai efisiensi sebesar Rp 8.858 dari pagu anggaran Rp 267.449.00 adalah 0.003 %.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dengan target 40 lembaga secara keseluruhan,realisasi capaian kegiatan 48 atas target IKU. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Pada tahun 2025 target pencemaran dicapai sebanyak 3 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan.

Tabel.17 Rekap Pengawasan Pencemaran

NO	TGL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA	DOKUMEN-DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN, MASA BERLAKU	IPAL	URAIAN HASIL PENGAWASAN	KETAATAN		REKOMENDASI
								TAAT	TDK TAAT	
A. PANGKALAN PSDKP TUAL										
B. SATWAS SDKP KAIMANA										
C. SATWAS SDKP MTB										
D. SATWAS SORONG										
1.	4 Desember 2025	"PT Pro Intertech Indonesia yang melakukan kegiatan usaha disektor Maritim berupa Docking dan perbaikan kapal. 0°48'21.78"S 131°17'38.92"E"	PT. Pro Intertech Indonesia	NIB 8120110191664	Penerbit OSS	-	"1. Memiliki dokumen usaha penanggulangan pencemaran dan telah melakukan upaya pencegahan sesuai dengan dokumen yang dimiliki. 2. Belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan saat ini telah melakukan penginputan permohonan PKKPR pada sistem OSS." "	Taat		"1. Memperbanyak tempat sampah di lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah padat dan cair. 2. Membuat papan informasi agar menjaga kebersihan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. 3. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut."
2.	10 Desember 2025	"PT Bagus Jaya Abadi yang beralamat di Jl. Kapitan Patimura Kelurahan Tanjung Kasari, Distrik Maladumes Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya titik Koordinat 0°49'11.80"S 131°14'55.07"E"	PT. Bagus Jaya Abadi	NIB 9120007220944	Penerbita OSS		"1. Usaha/kegiatan ini telah melakukan upaya pencemaran sesuai dokumen rencana pencegahan pencemaran yang dimiliki. 2. Sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Bagus Jaya Abadi diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran."	Taat		"1. Memperbanyak tempat sampah di lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah padat dan cair. 2. Membuat papan informasi agar menjaga kebersihan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. 3. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut."
2	11 Dec-2025	"PT Klasaman Indah Raya yang beralamat di Jl. Gurami No.229 Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya titik Koordinat 0°52'55.06"S 131°15'43.52"E."	PT. Klasaman Indah Raya Sorong	Nomor Induk Berusaha : 9120206760135	Penerbit : OSS	UKL- UPL	1. Usaha/kegiatan ini telah melakukan upaya pencemaran sesuai dokumen rencana pencegahan pencemaran yang dimiliki. 2. Memiliki sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Klasaman Indah Raya diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran."	Taat		"1.Memperbanyak tempat sampah di lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah padat dan cair. 2. Membuat papan informasi agar menjaga kebersihan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. 3. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut."
E. SATWAS SDKP MERAUKE.										
F. SATWAS SDKP MIMIKA.										
G. WILKER RAJA AMPAT										
H. WILKER FAK-FAK										
I. WILKER PSDKP DOBO										

a.2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikategorikan dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Kawasan konservasi yang dikelola di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual berjumlah 2 kawasan. Kawasan tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam menunjang capaian ini adalah pengawasan pemanfaatan pelaku usaha pada kawasan konservasi serta kesesuaian lokasi usaha dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut.

Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pangkalan PSDKP Tual tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel.18 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual

No.	Nama Kawasan	Lokasi	Dasar Hukum
1.	SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya	Raja Ampat, Papua Barat Daya	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
2.	SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya	Raja Ampat, Papua Barat Daya	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha pada Kawasan konservasi perairan Nasional (KKPN). Pelaksanaan pengawasan Kawasan konservasi dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional SAP Raja Ampat yang dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Raja Ampat serta pengawasan Kawasan konservasi perairan nasional. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kei Kecil dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan pengawasan Kawasan konservasi daerah.

Kegiatan pendukung utama pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi : Pengawasan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pada Tahun 2025 dari 2 target Pangkalan PSDKP Tual telah 40 pelaku usaha kategori target IKU dan secara total 48 pelaku usaha termasuk di dalamnya terhadap pemanfaat yang berada beraktifitas dalam kawasan konservasi.

Tabel.19 Data Pengawasan KKPN

NO	NAMA KKP-N-KKPD	TANGGAL PENGAWASAN	ZONA YANG DIAWASI	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN	DOKUMEN PERIZINAN	MASA BERLAKU	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
1.	PANGKALAN PSDKP TUAL								
2.	Wilker Raja Ampat								
	SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya	17 s.d 19 September 2025	Zona Pemanfaatan	1. Bagan Fauzan Ardan (6GT)	Penangkapan Ikan	TDKP - 46.25.9197.30.00016	-	Zona Pengawasan tidak sesuai	Bagan diarahkan untuk keluar dari kawasan zona konservasi karena memiliki GT 6
			Zona Pemanfaatan	2. Perahu Pancing Bi Indi 03	Penangkapan Ikan	TDKP -	-	Zona Pemanfaatan sesuai	Melanjutkan kegiatan
			Zona Pemanfaatan	3. Perahu Pancing Putri Tunggal	Penangkapan Ikan	TDKP-	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	4. Perahu Pancing Yansen Dimara	Penangkapan Ikan	TDKP-	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	5. Perahu Pancing J. Mambraku	Penangkapan Ikan	TDKP-	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	6. Bagan Manyafun	Penangkapan Ikan	TDKP	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	7. KM. Hasil Doa 01 (21GT)	Penangkapan Ikan	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Penangkapan Ikan	08-Nov-25	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan

						(No : 43.24.9297.5268.00210)				
			Zona Pemanfaatan	8.	Perahu Pancing Putra Yefmo 01	Penangkapan Ikan	TDKP	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	9.	Speed Raja Empat Divers	Tracking dan Snorkling	TDKP	-	Zona Pemanfaatan	Agar Membawa Bukti Bayar Masuk Kawasan Konservasi
	SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya	08 s.d 10 Oktober 2025	Zona Pemanfaatan	11.	Bagan Karaka 01	Snorkling dan Tracking	E-BKP (Dinas P2KP Prov. PBU) No : B.92000024	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	12.	Heritage Adventurer (Kapal Pesiar)	Parawisata Alam Perairan	Nihil	-	Terdapat 128 WNA dan belum memiliki tiket	Segera melapor kepada pengelola kawasan untuk mendapatkan tiket masuk
			Zona Pemanfaatan	13.	KLM Wisesa (Kapal Layar Motor)	Parawisata Alam Perairan	Karcis Masuk	-	Kaapal membawa 8 WNA dari Australia	Melanjutkan kegiatan
			Zona Pemanfaatan	14.	Perahu Pancing Matkof 01	Penangkapan Ikan	TDKP	Nihil	Penangkapan ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas menggunakan alat tangkap <i>Hand Line</i>	
			Zona Pemanfaatan	15.	Perahu Pancing Sofianus Mambarsar	Penangkapan Ikan	TDKP	Nihil	Penangkapan ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas menggunakan alat tangkap <i>Hand Line</i>	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	16.	Perahu Pancing Lakuruto	Penangkapan Ikan	TDKP	Nihil	Penangkapan ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas menggunakan alat tangkap <i>Hand Line</i>	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	17.	Perahu Pancing Jihon Mayor	Penangkapan Ikan	TDKP	Nihil	Penangkapan ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas menggunakan alat tangkap <i>Hand Line</i>	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	18.	Keramba Jaring Apung Wariyo	KJA (Pembesaran Ikan Kerapu)	TDKP	Nihil	Membeli Ikan Kerapu dari nelayan kemudian dibersihkan sebelum di ekspor	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	19.	Perahu Kompresor ini Boleh 07	Penangkap Ikan	-	-	Disarankan untuk tidak menggunakan kompresor saat menyelam karena berbahaya untuk kesehatan	Melanjutkan Kegiatan
			Zona Pemanfaatan	20.	Bagan Aswan	Penangkap Ikan	Tidak membawa dokumen	Nihil	Melakukan penangkapan ikan didalam Kawasan Konservasi tanpa membawa dokumen perizinan	Membawa dokumen saat melakukan kegiatan dan keluar dari zona pemanfaatan terbatas
			Zona Pemanfaatan	21.	KM.Harapan Indah IX	Pembelian Ikan Hidup di sentra nelayan pulau Mutas	NIB : 9120001282619 PB Subsektor Pengangkutan Ikan Hidup	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Melanjutkan Kegiatan

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 19 pelaku usaha 3 diantaranya adalah target IKU di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi.

Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel.20 Rekap Pengawasan PRL

NO	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPRL	KETAATAN		REKOMENDASI
				Terbit PKKPRL	TAAT	TIDAK TAAT	
1	Pangkalan PSDKP Tual						
1	10 Juli 2025	Pulau Ut, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual	Nama : PT. Rajawali Laut Timur Alamat : Desa Rumah Tiga Rt 002/004, Desa/Kelurahan Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku NIB : Kegiatan Usaha : KJA (lok. Pulau Ut) Status Modal : PMDN Dokumen PKKPRL : Nomor 08082310518100010	Dokumen PKKPRL : Nomor 08082310518100010 Terbit : 8 Agustus 2023	V	-	Berdasarkan hasil verifikasi, kegiatan pBerdasarkan hasil verifikasi, kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT Samudra Indonesia Sejahtera telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang laut.

			Terbit : 8 Agustus 2023 Luas : 0,05 Ha Kedalaman : 4 meter.				
2	29 Juli 2025	Desa Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual	Nama : PT. Samudra Indo Sejahtera Alamat : Jln. Dullah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Prov. Maluku NIB : 8120103840915 KBLI : 52224 – Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : Nomor 24122110518100002 Terbit : 22 Desember 2021 Luas : 13,92 Ha Kedalaman : 8 meter.	Dokumen PKKPR : Nomor 24122110518100002 Terbit : 22 Desember 2021	V	-	Berdasarkan hasil verifikasi, kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh PT Samudra Indonesia Sejahtera telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang laut.
3	11 Desember 2025	Kelurahan Masrum, Kota Tual	"Nama : PT. Pertamina Patra Niaga (Tual) Alamat : Kelurahan Masrum Desa Tual, Kota Tual Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI Detail Kegiatan : Pengembangan Dermaga Fuel Terminal Tual Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : 15022310518100023 Terbit : 15 Februari 2023 Luas : 3,22 Ha Kedalaman : 9 meter."	"Dokumen PKKPR : 15022310518100023 Terbit : 15 Februari 2023"	V	-	"Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. PT. Pertamina Patra Niaga Tual telah menyampaikan laporan tahunan periode 15 Februari 2024 s/d 15 Februari 2025 2. Untuk laporan tahunan periode 15 Februari 2025 s/d 15 Februari 2026, sedang dalam proses penyusunan dan perbaikan data dukung, berdasarkan hasil diskusi 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Tual telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
4	17 Desember 2025	Perairan Pulau Ubur, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual	"Nama : CV. Yong Fisheries (KJA) Alamat : Perairan Pulau Ubur, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual Kegiatan Usaha : Pembesaran Plesces (Ikan bersirip laut budidaya ikan (KJA) Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : 17072510518100020 Terbit : 17 Juli 2025 Luas : 0,27 Ha "	"Dokumen PKKPR : 17072510518100020 Terbit : 17 Juli 2025"	V	-	"Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta dokumen yang dimiliki, didapati hasil sebagai berikut : 1. Pelaku usaha CV. Yong Fisheries telah memiliki persetujuan KPR yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2025 sehingga penyampaian laporan tahunan periode 1 jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2026 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh CV. Yong Fisheries telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku "
2	Satwas MTB						
5	13 Maret 2025	"Lokasi: Desa Ilingel, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Titik Koordinat : 07°54'42"E 131°20'29"E	Nama : PT. Mina Timur Indonesia Nama Penanggungjawab : Claudio Canigia NIB : 9120202111174 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) - KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)- KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) Detail Kegiatan : Dermaga Tambat Labuh Kapal Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR) NPWP : 31.684.434.9-807.001 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Instansi Penerbit : Menteri Investasi dan Kepala BKPM"	Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Titik Koordinat : 07°54'42"E 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR)"	V	-	"Disampaikan juga kepada pelaku usaha agar memperhatikan kondisi ekosistem perairan di sekitar dan tidak melakukan kegiatan pencemaran laut yaitu hasil pembuangan sampah/limbah kegiatan Perusahaan."
3	Satwas Sorong						
6	20 Februari 2025.	Lokasi: Selat Dampar, Provinsi Papua Barat. Titik Koordinat : I. 131° 14'48,139" BT- 0°50'53,425" LS II. 131° 14'35,337" BT- 0°51'1,678" LS III. 131° 14'35,644" BT- 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT- 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT- 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT- 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT- 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT- 0°50'53,236" LS	"Nama Pelaku Usaha : JULIO FRANCO SUTRISNO NIB : 1803220035271 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 43120 (Penyiapan Lahan) - KBLI 56101 (Restoran) Detail Kegiatan : Rumah Makan dan Dermaga Wisata Luas pemanfaatan : 3,43 Ha Skala Usaha : Usaha Kecil Tingkat Resiko - Tinggi NPWP : 94.508.649.4-026.000 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal"	"Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Luas pemanfaatan : 3,43 Ha"	V	-	"1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan didalam zon diluar kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. "
7	24 Februari 2025	"Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya" § 131°14'59,766"BT; 0°49'08,508"LS § 131°15'00,068"BT; 0°49'07,374"LS § 131°15'01,678"BT; 0°49'06,031"LS § 131°14'59,215"BT; 0°49'09,750"LS § 131°14'53,664"BT; 0°49'11,471"LS	"Nama Pelaku Usaha : PT. Papua Resort NIB : 0230000932444 Jenis Kegiatan Usaha : Restoran Detail Kegiatan : Wisata Bahari Lokasi: Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya Luas pemanfaatan : 1,87 Ha Kedalaman : 4 meter. NPWP : 03.082.758.8-951.000 Status Modal : PMA Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal"	"Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT- 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'59,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT- 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha"	-	V	"Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT. Papua Resort dihimbau untuk menyampaikan laporan tahunan melalui aplikasi e-sea.kkp.go.id."

8	24 April 2025	Papua Barat daya, Kompleks Kek Arar	"Nomor PKKPR : 22122310519200001 Nama Pelaku Usaha : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tanggal terbit : 22 Desember 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI : 82920 Kegiatan Usaha : Aktivitas Pengepakan Detail Kegiatan Usaha : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Luas/Panjang : 7,85 Ha Kedalaman : 12 M "	"Tanggal Penerbitan PKKPR : 22 Desember 2023 PKKPR : 22122310519200001 Luas pemanfaatan : 1,87 Ha"	V		P "Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. "
9	09 Mei 2025	Jalan Kasuari, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.	"Nama : PT. Sagawin Sentosa Maritim Alamat : Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan Suprauw Distrik Maladum Mes Kota Sorong, Prov. Papua Barat Day NPWP :- NIB : 2707230116221 KBLI : 52221 – Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut HP : 081344229999 Email : sagawinsentosamaritim@gmail.com Status Modal : PMDN	TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PKKPR	-	V	Akan dilakukan penangan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pro Intertech Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	08 Mei 2025	Jl. Pengalengan Klalin 1, Desa/Kelurahan Klabinain, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya"	"Nomor PKKPR : 06102310519600002 Nama Pelaku Usaha : PT. Dokindo Aimas Papua Tanggal terbit : 06 Oktober 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI :- Kegiatan Usaha : Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung Detail Kegiatan Usaha : Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal Luas/Panjang : 5,06 Ha Kedalaman : 4 M "	Nomor PKKPR : B.400/Men-KP/VI/2022Terbit : 13 Juni 2022	v		Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
11	31 Juli 2025	Jln. Gurami No 229, Desa/Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Daya	"Nama : PT. Klasaman Indah Raya Alamat : Jln. Gurami No 229, Desa/Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Daya NIB : 9120206760135 KBLI : 33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Apung Tingkat Risiko : Menengah Tinggi Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR : Nomor 06052410519600001 Terbit : 06 Mei 2024 Luas : 0,70 Ha Kedalaman : 7 meter."	"Dokumen PKKPR : Nomor 06052410519600001 Terbit : 06 Mei 2024 Luas : 0,70 Ha Kedalaman : 7 meter."	V	-	"Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. "
12	05 Agustus 2025	Jl.Cakalang Komplek Perikanan Sorong, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Nama : PT. Marina Sorong Indonesia Alamat : Jl. Cakalang Komplek Perikanan Sorong, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat NIB: 0220003381609 KBLI : 93249 – Wisata Tirta Lainnya Tingkat Risiko : Menengah Tinggi Status Modal : PMA Dokumen PKKPR : Nomor 03062510519600003 Terbit : 03 Juni 2025 Luas : 0,53 Ha Kedalaman : 6 Meter.	Dokumen PKKPR : Nomor 03062510519600003 Terbit : 03 Juni 2025 Luas : 0,53 Ha Kedalaman : 6 Meter.	V	-	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlu nya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu nya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT Marina Sorong Indonesia dihimbau untuk menambah sarana dan prasarana pengelolaan limbah.
13	20 Oktober 2025	Jl. Obeth Mubalus, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat Daya	"Nama : PT. Pro Intertech Indonesia Alamat : Jl. Obeth Mubalus, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat Daya NIB: 8120110191664 KBLI : Tingkat Risiko : Status Modal : PMDN Dokumen PKKPR :- Luas : "	TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PKKPR	V	-	Akan dilakukan penangan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pro Intertech Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	10 Desember 2025	PT. Pertamina Patra Niaga- Fuel Terminal, di Jl. Jenderal A.Yani, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	"Nama Perusahaan : PT. Pertamina Patra Niaga- Fuel Terminal Sorong - Penanggung Jawab : - KBLI : 46610 - Jenis Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI Tidak Termasuk Dalam Lainnya - Lokasi : Jl. Jenderal A.Yani, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya - Titik Koordinat PKKPR : 1. 131° 14' 52,891" BT- 0° 52' 41,375" LS 2. 131° 14' 49,996" BT- 0° 52' 43,215" LS 3. 131° 14' 48,934" BT- 0° 52' 46,744" LS 4. 131° 14' 57,671" BT- 0° 52' 48,423" LS 5. 131° 14' 59,861" BT- 0° 52' 41,058" LS 6. 131° 14' 54,340" BT- 0° 52' 39,803" LS - Nama Perairan : Selat Dampier - Luas Pemanfaatan : 5,74 Hektar - Tanggal Terbit : 3 November 2022 - No. PKKPR : 03112210519200003"	"Tanggal Terbit : 3 November 2022 No. PKKPR : 03112210519200003"	V	-	Kkarena telah memenuhi kewajiban terhadap PKKPR, PT Pertamina Patra Niaga Sorong diharapkan tetap memperhatikan kewajiban sebagai pemegang persetujuan KPR.

15	11 Desember 2025	PT. Bagus Jaya Abadi di area pesisir Saoka, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	"Nama Perusahaan : PT. Bagus Jaya Abadi - Penanggung Jawab : Ronald Luis Sanuddin/Direktur Utama - KBLI : 08999 - Jenis Kegiatan Usaha : Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya - Lokasi : Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat Daya - Titik Koordinat PKKPR : 1. 131°14'53,650" BT - 0°49'11,248" LS 2. 131°14'58,967" BT - 0°49'09,311" LS 3. 131°14'59,766" BT - 0°49'08,508" LS 4. 131°15'00,068" BT - 0°49'07,374" LS 5. 131°15'01,678" BT - 0°49'06,031" LS 6. 131°14'59,215" BT - 0°49'09,750" LS 7. 131°14'53,664" BT - 0°49'11,471" LS - Nama Perairan : Selat Dampier - Luas Pemanfaatan : 0,33 Hektar - Tanggal Terbit : 10 Agustus 2022 - No. PKKPR : 01082210519200001"	"Tanggal Terbit : 1 Agustus 2022 No. PKKPR : 01082210519200001"	V	-	Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mematuhi zonasi sebagaimana tercantum dalam PKKPR yang dipunyai dan RZWP3K Provinsi.
16	12 Desember 2025	"PT. Inti Sarana Bandar di Jl. Kasuari, Kelurahan Tamba Garam, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya."	"Nama Perusahaan : PT. Inti Sarana Bandar Sorong - Penanggung Jawab : Garry G. G. Lie - KBLI : 50133 - Jenis Kegiatan Usaha : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus - Lokasi : Jl. Kasuari, Kelurahan Tamba Garam, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya - Titik Koordinat PKKPR : 1. 131° 14' 40,939" BT - 0° 50' 49,795" LS 2. 131° 14' 38,155" BT - 0° 50' 51,662" LS 3. 131° 14' 39,094" BT - 0° 50' 53,308" LS 4. 131° 14' 34,281" BT - 0° 50' 55,861" LS 5. 131° 14' 31,980" BT - 0° 50' 51,980" LS 6. 131° 14' 37,698" BT - 0° 50' 47,518" LS 7. 131° 14' 39,642" BT - 0° 50' 45,758" LS - Nama Perairan : Samudera Pasifik - Luas Pemanfaatan : 5 Hektar - Tanggal Terbit : 30 Mei 2024 - No. PKKPR : 30052410519600003"	"Tanggal Terbit : 30 Mei 2024 No. PKKPR : 30052410519600003"	V	-	Terkait dengan belum dibuatnya Laporan Tahunan PKKPR, maka direkomendasikan kepada PT. Inti Sarana Bandar agar segera membuat Laporan Tahunan PKKPR.
4	Satwas Mimika						
17	25 November 2025	Alur pelayaran Pelabuhan Amamapare	"Nama : PT. Freeport Indonesia Alamat : NIB : 8120101882585 KBLI : 07294 - Pertambangan Biji Tembaga Tingkat Risiko : Status Modal : Dokumen : PKKPR : 03122410519400002 Terbit : 3 Desember 2024 Luas : "	"Tanggal Penerbitan : 3 Desember 2024 Dokumen : PKKPR : 03122410519400002"	V	-	"Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah: 1. Agar PT Freeport Indonesia menyampaikan Laporan Tahunan PKKPR sebelum tanggal 2 Desember 2025; 2. Agar PT Freeport Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap data dukung dalam Laporan Tahunan PKKPR, sehingga informasi yang disampaikan lebih lengkap dan sesuai ketentuan; 3. Agar kegiatan pengerukan dan pembuangan material hasil pengerukan terus dimonitor secara berkala, khususnya terkait batas area PKKPR untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran ruang laut."
5	Satwas Kaimana						
18	28 November 2025	Teluk Bitsyari dan Desa Marsi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	"Nama : PT AMERA NUS Alamat : Teluk Bitsyari dan Desa Marsi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat NIB : 8120002732305 KBLI : 03215- Pembesaran Mollusca Laut Tingkat Risiko : Status Modal : Dokumen : PKKPR : 20032310519200002 Terbit : 20 Maret 2023 Luas : "	"Tanggal Penerbitan : 20 Maret 2023 Dokumen : PKKPR : 20032310519200002"	-	V	"Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal yang disarankan adalah : 1. Diingatkan kepada PT. Amera Nus (Sisir) agar menyampaikan Laporan Tahunan PKKPR sebelum tanggal 20 Maret 2025; 2. Agar PT. Amera Nus (Sisir) untuk melengkapi pemenuhan dokumen yg belum dilengkapi agar Sertifikat Standar terbit terverifikasi, 3. Diingatkan untuk memperpanjang Sertifikat CBIB yang akan berakhir pada tanggal 04 Januari 2026, berakhir pada tanggal 04 Januari 2026,"
6	Raja Ampat						
19	3 Desember 2025	Kampung Yenwounpor Distrik Meos Manswar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.	"Nama : PT Sea Horse Paradise Alamat : Kampung Yenwounpor Distrik Meos Manswar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Jenis Kegiatan : Fasilitas Penunjang Wisata Bahari/Restoran Status Modal : PMDN Dokumen : PKKPR : 19012410519600007 Terbit : 19 Januari 2024 Luas : 2,34 Ha"	"Dokumen : PKKPR : 19012410519600007 Terbit : 19 Januari 2024"	V	-	"PT. Sea Horse Paradise telah memenuhi aturan terkait perizinan PKKPR. Kegiatan Pemanfaat Ruang Laut sesuai dengan perizinan dan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan persetujuan KPR.



Gambar : 8 Pengawasan PRL pada PT.Samudera Indo Sejahtera

4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 3 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 1 target yang ditetapkan.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil meliputi pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut data pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025.

Tabel.21 Rekap pengawasan PWP3K

No	Jenis IKU	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan
A	Pangkalan PSDKP Tual					
c	Wilker Raja Ampat					
1	Pangkalan PSDKP Tual (Wilker PSDKP Raja Ampat)	PT. Kawei Sejahtera Mining	9 Juni 2025	Kampung Selpelle Teluk Aljui, Pulau Duyef Titik Koordinat 0°11'25.82"S 130°15'39.79"	Pertambangan Bijih Nikel	"dokumen PKKPRL Nomor 18082310519200001 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2023 dengan luasan 12.99 Ha."
2	Pangkalan PSDKP Tual (Wilker PSDKP Raja Ampat)	PT. GAG Nikel	10 Juni 2025	" dokumen PKKPRL Nomor	Pertambangan Bijih Nikel	NIB : 2705220046749 Diterbitkan Tanggal : 27 Mei 2022 perubahan ke 1 Tanggal 1 Juni 2022 Penerbit OSS Ijin PKKPRL : - ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil : -
3	Pangkalan PSDKP Tual (Wilker PSDKP Raja Ampat)	Home stay Yefkabu	16 Oktober 2025	2607241051920001 diterbitkan tanggal 26 Juli 2024 dengan luasan 14,77 Ha"	Home stay (Penginapan)	



Gambar : 9 Pengawasan PWP3K

4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya pengawasan sumber daya Perikanan

Sasaran kegiatan ke empat menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks penyelesaian pelaku usaha sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)", IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023, merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

e. IKU 5: Indeks Pemeriksaan Sumber Daya Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)

IKU Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Pangkalan PSDKP Tual dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

x_{sdp}	:	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
X_i	:	Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
n	:	Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel.22 Pemeriksaan IKU 6

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Keterangan pola perhitungan

- $TW I = TW I$
- $TW II = (TW I + TW II)/2$
- $TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$
- $TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 5 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.
5. Kualitas penyelesaian pemeriksaan jenis ikan yang dilindungi

IKU ini dapat dicapai Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan

yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut tabel capaian indikator kinerja 5.

Tabel. 23 Capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	-	-

Tabel. 24 Perbandingan IKU 5 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IKU 5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Berikut kami sajikan tabel rekapitulasi total pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel. 25 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

REKAPITULASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA LINGKUP PANGKALAN PSDKP TUAL TAHUN 2025								
NO	BULAN	PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	JIL	KPB	Total
1	Semester I		1	0	0	0	0	1
2	April		1	1	2		1	5
3	Mei		1	1				2
4	Juni	1	0	1				2
5	Juli	2		1				3
6	Agustus			1				1
7	September							0
8	Oktober	8				3		11
9	November					25		25
10	Desember							0
	Total	11	3	5	2	28	1	50
	Target							14

$$\text{Capaian IKU 8} = \frac{11,00+3,00+5,00+2,00+28,00+1}{50,00} = \frac{50,00}{50} = 100$$

$$\text{Capaian IKU 8} = \frac{TWI+TWII+TWIII+TWIV}{4} = \frac{100+100+100+100}{4} = \frac{400}{4} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan

pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;

2. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
3. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
4. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
5. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Efisiensi penggunaan sumber daya perikanan pada indikator kinerja ini dicapai dengan beberapa faktor diantaranya;

- Melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan pada satu lokasi yang sama apabila ditemukan lebih dari satu objek pengawasan;
- Memilih rute pengawasan yang secara jarak berdekatan dengan unit usaha yang lain sehingga dalam satu perjalanan dapat memperoleh lebih dari satu unit usaha yang diperiksa.

Sampai dengan akhir tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 100% atau sebesar Rp.353,881,965,-

dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp353,888,000- dengan capaian output sebesar 50 atau 100 % dari target yaitu 40 dengan nilai efisiensi sebesar 0,0017 % sebagaimana kami sajikan dalam tabel di bawah.

Tabel. 26 Perhitungan efisiensi penggunaan

No	Output Program	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.QIC 001	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	40	50	100%	353.888.000	353.881.965	353.888.000	6.035
TOTAL					353.888.000	353.881.965	352.999.000	6.035

Catatan : Nilai efisiensi sebesar Rp 6.035 dari pagu anggaran Rp 353.888.000. adalah 0,0017 %.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

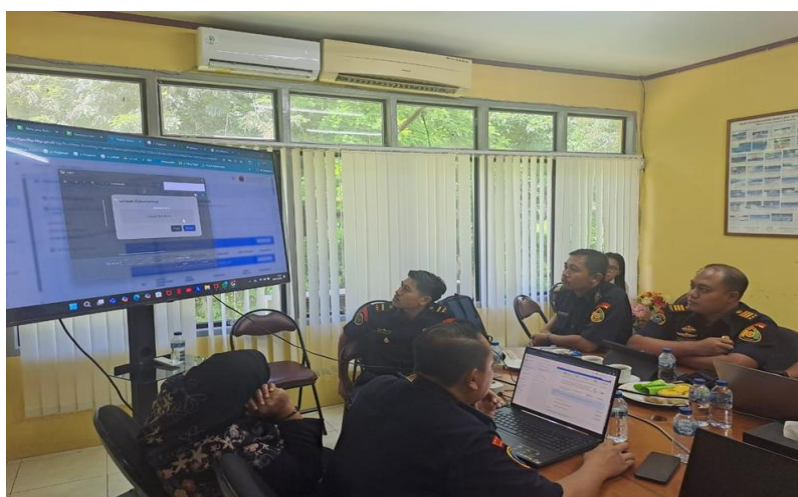
Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan dalam kurun waktu sampai dengan akhir tahun 2025 telah melaksanakan pemeriksaan kepada 11 pelaku usaha, yang terbagi di Pangkalan PSDKP Tual maupun di satwas. Salah satu kendala dalam pemeriksaan ini adalah banyaknya kapal perikanan yang melakukan penangkapan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual namun tidak berkantor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Selain melakukan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko, Pangkalan PSDKP Tual melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu tahun 2025 Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 8.450 SLO dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 27 Rekapitulasi penerbitan SLO Tahunan

No	Bulan	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	JANUARI	144	308	304	423	500	489	85	96	96	714	904	889	98,34	889	15
2	FEBRUARI	103	152	150	409	454	438	91	84	84	603	690	672	97,39	672	18
3	MARET	211	183	172	488	372	349	85	73	73	784	628	594	94,59	594	34
4	APRIL	123	154	153	351	467	463	63	80	80	537	701	696	99,29	696	5
5	MEI	206	211	208	355	386	383	50	57	57	611	654	648	99,08	648	6
6	JUNI	187	210	210	287	370	366	45	35	35	519	615	611	99,35	611	4
7	JULI	227	248	248	379	414	410	60	98	98	666	760	756	99,47	756	4
8	AGUSTUS	199	220	220	337	341	332	84	83	83	620	644	635	98,60	635	9
9	SEPTEMBER	240	247	246	387	376	376	84	90	90	711	713	712	99,86	712	1
10	OKTOBER	275	283	278	392	450	446	100	114	114	767	847	838	98,94	838	9
11	NOVEMBER	266	231	229	404	397	393	84	86	86	754	714	708	99,16	708	6
12	DESEMBER	387	250	246	539	382	370	81	75	75	1.007	707	691	97,74	691	16
JUMLAH		2.568	2.697	2.664	4.751	4.909	4.815	912	971	971	8.293	8.577	8.450	98,52	8.450	127

Tabel. 28 Pengawasan penangkapan kapal perikanan

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Tanggal Pengawasan	Status	Rekomendasi (BAP)
1	PT. Industri Perikanan Namatota	202109-1312-0041-3211-48	II	Penangkapan Ikan	OSS	11/06/2025	Beroperasi	Pembinaan dan Perbaikan
2	LAURENSIA TANZIL	202412-0213-0346-2643-404	III	Penangkapan Ikan	OSS	03/07/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT TRINADI MINA PERKASA	202112-2115-3159-2271-616	III	Penangkapan Ikan	OSS	29/07/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	PT INSANI GEMILANG PUALAM (IGP 08)	202412-3011-5750-2462-337	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
5	PT. INSANI GEMILANG PUALAM (IGP 16)	202412-301401406-5956-099	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	PT. INSANI GEMILANG PUALAM (IGP 17)	202412-3014-2834-7542-311	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	PT. INSANI GEMILANG PUALAM (IGP 18)	202412-3014-3255-0624-889	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	PT. TRINADI MINA PERKASA (TMP 51)	2024-0411-3843-4481-020	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	PT. TRINADI MINA PERKASA (TMP 52)	202423-1616-0806-7805-216	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	PT. TRINADI MINA PERKASA (TMP 53)	202412-1713-5429-6578-695	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	PT. TRINADI MINA PERKASA (TMP 55)	202412-1715-1402-2708-360	IV	Penangkapan Ikan	OSS	27/10/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar : 10 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI yang dilaksanakan Tahun 2025 kepada 6 unit usaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel. 29 Rekap Pengawasan Pengolahan

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Tanggal Pengawasan	Status	Rekomendasi (BAP)
1	BONNI TANER	-	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	23/04/2025	Beroperasi	Pembinaan dan Perbaikan
2	PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG SORONG	-	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	05/06/2025	Beroperasi	Pembinaan dan Perbaikan
3	PT DWI BINA UTAMA	201912-3009-3201-5845-583	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	25/06/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (Patuh)
4	PT MINA BINTUNI ABADI	202106-1012-3725-4921-055	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	30/06/2025	Beroperasi	Pembinaan dan Perbaikan
5	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	202412-3014-3758-8536-657	IV	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	29/07/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (Patuh)
6	BUMI LAUT PERTIWI	202501-3112-0202-5942-055	IV	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	30/08/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (Patuh)



Gambar : 11 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Tahun 2025 kepada 36 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual berikut gambar dan tabelnya.

Tabel. 30 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Tanggal Pengawasan	Status	Rekomendasi (BAP)
1	ANDA TUAL OCEAN FISHERIES	202211-1811-5655-9093-839	II	Distribusi dan Pemasaran	OSS	24/04/2025	Beroperasi	Pembinaan dan Perbaikan
2	HAI ZHONG BAO	202404-2022-5352-7727-934	II	Distribusi dan Pemasaran	OSS	24/04/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT. BUMI LAUT PERTIWI	202501-3112-0202-5942-055	III	Distribusi dan Pemasaran	OSS	20/08/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar : 12 Pengawasan pendistribusian ikan

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan Tahun 2025 dilaksanakan kepada 3 pelaku usaha budidaya. Berikut data kami disajikan dalam tabel:

Tabel. 31 Rekap pengawasan budidaya

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Tanggal Pengawasan	Status	Rekomendasi (BAP)
1	PT. Yellu Mutiara	202104-2116-2614-1566-028	I	Pembudidayaan Ikan	Insidental	24/02/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	Daud Yusuf (POKDAKAN SIDO MUNCUL)	-	II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	16/04/2025	Beroperasi	Belum memiliki dokumen perizinan pernyataan dasar usaha berupa NIB, komoditi yang di budidayakan ikan nila dan mas, asal bahan baku dari kab. Sleman dan Tatalu Kab. Minahasa Utara, pemasaran lokal Kab. Sorong dan hasil produksi (Pembesaran)
3	PT. DAFIN MUTIARA	202101-1114-5454-8918-654	II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	02/05/2025	Beroperasi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar: 13 Pengawasan budidaya

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai akhir tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 39 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Pangkalan PSDKP Tual sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan pangkalan PSDKP Tual terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Sebagai salah satu fenomena yang terdapat dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di wilayah Maluku Tenggara terkhususnya kepulauan kei terdapat pemanfaatan Tabob (penyu belimbing) dalam ritual adat dan menjadi makanan, tidak hanya itu masyarakat Pulau Ut yang ada di kepulauan Kei juga dikenal mengkonsumsi dugong yang merupakan jenis ikan dilindungi atau penangkapan ikan napoleon dengan ukuran yang dilarang. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi.

Tabel. 32 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

NO	TANGGAL	LOKASI	PELAKU USAHA	JENIS IKAN	DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN	URAIAN
A. PANGKALAN PSDKP TUAL							
1.	11-November-2025	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dilaksanakan di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Dan Lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Dumar, Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, provinsi Maluku Kota Tual Koordinat 5,5381895LS 132,78086674BT/ 5,618960 LS 132,740872 BT	CV. Indo Marine Fish (Rizal Wijaya0	Hiu dan Pari	NIB : 9120501810162 SIPJI : I-202110131527094733780	Penerbit OSS	Telah memenuhi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dengan perlindungan terbatas dan disampaikan sosialisasi kepada pelaku usaha kedepannya untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat laporan realisasi

							kuota jika kuota pemanfaatan dari Loka PSPL Sorong sudah terbit
B. SATWAS SDKP KAIMANA							
2	03-November - 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl.Utarum Bantemi,Kelurahan Krooy Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°39'49,13464"LS – 133°42'26"BT	UD.Matahari Tmur	Hiu	NIB. 020005330166 Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan 41/1/KKP/2021	BKPM	Sesuai hasil pengawasan dan wawancara dengan Bpk Jaja Sudrajat sebagai pelaku usaha dan penanggung jawab dalam melakukan usaha telah dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan dokumen SIPJI,tidak ditemukan jenis ikan yang dilindungi/atau yang termasuk dalam Appendiks II CITES sesuai perturan perundang – undangan.
3	10 -November- 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°39'54"LS –133°45'35"	Kholil Yusuf	-Hiu Kerbau -Hiu Lanjaman -Hiu Kejen	Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120004490816 Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) : I- 202210101326055108525 SK penetapan kuota pengambilan /Ekspor: B.100/LPSPL.1/PRL/RL.530/I/ 2024 Surat Ijin Pengumpul Hasil Perikanan (SIPHP) : 523.3/16/SIPHP/DPMPSTP-TK/2023	Penerbit OSS	Pada saat pengawasan di lapangan tidak ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan yang tergolong dalam Jenis Ikan dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendiks II CITES sesuai peraturan perUndang undangan yang berlaku. Selain itu dokumen perizinan usaha pun telah terlaksana sesuai peraturan per-undang undangan
4	17-November- 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl.Sisir, Desa/Kel Kaimana Kota, kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat dengan titik koordinat 03°39'30"LS – 133°45'53"BT.	Ambrin Lamadi (UPI)	-	Nomor Induk Berusaha (NIB): 1297000731233 ID SIPJI Perdagangan DN : I- 20221014083717350377 0	Penerbit OSS	UPI milik Ambrin Lamadi Pada saat pengawasan di lapangan tidak di temukan adanya komoditi perikanan (sirip hiu, pari dan teripang), hal ini dikarenakan kuota pengambilan yang dimiliki telah dipergunakan seluruhnya sehingga dari pihak pengepul untuk sementara tidak melakukan kegiatan pengambilan/pembelian, sesuai informasi yang di dapatkan kegiatan akan dijalankan kembali ketika SK Penetapan Kuota pengambilan sudah terbit yang baru.
5	22-Novemeber- 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di UPI milik Sutrisno yang berada di Jl. Nikolas Kabes. kec. Kaimana Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat dengan titik koordinat 03°40'5"LS– 133°45'48"BT	Sutrisno	-Hiu Sirip Hitam -Hiu Banteng -Hiu Pemintal	Nomor Induk Berusaha : 0220001782017 Nomor ID Ijin SIPJI Perdagangan DN : I- 202303211208081231947	Penerbit OSS	Sesuai hasil pengawan secara langsung di lapangan tidak ditemukan adanya pelanggaran, izin telah lengkap dan sesuai

							kegiatan dan pemanfaatan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. cumi, udang, Ikan Kembung, ikan Kuwe, ikan Cakalang, ikan Tenggiri dan ikan Kakap merah
C SATWAS SDKP MTB							
D. SATWAS SDKP MERAUKE							
6	27-Oktober-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Menara Lampu I, Kel. Samkai, Kec. Merauke, Kab. Merauke Papua Selatan koordinat 8°50'36"LS dan 140°37'59"BT.	UD. Nelayan Barokah (Asnawing)	Hiu dan Pari	NIB : 6473033112700062 SIPJI : I-202304262118291762587 SAJI : 70/I/KKP/2021	Penerbit	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
7	28-Oktober-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di CV. Bintang Fahri Internasional, Jl. Ternate GG Hj. Kasim, Kel. Seringgu, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°30'44"LS dan 140°23'00"BT. 140°37'59"BT.	Taufik Latarissa, S. Sos (CV. Bintang Fahri Internasional)	-Pari Kikir -Par Barong -Pari Kemejan -Pari Kekeh	NIB : 8120102801461 SIPJI DN : 53/1/KKP/2021 SIPJI LN : 52/1/KKP/2021 SAJI : 00212/SAJI/LN/PRL/III/2024	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
8	03 November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Elvis Prissley Jl. Ampera 2 No. 9, Kel. Maro, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°29'32" LS dan 140°24'07" BT.	Elvis Prissley	Hiu dan Pari	NIB : 9120011120363 SIPJI : 59/I/KKP/2021	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
9	06 November 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Hermanus Marang Jl. Pelabuhan Samudera Kel. Karang Indah Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°49'467" LS dan 140°379'889" BT.	Hermanus Marang		Belum Ada	-	Untuk segera membuat laporan kegiatan usaha (LKU) dan membuat laporan kegiatan penanaman modal Telah memenuhi persyaratan dasar usaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	11- November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Hengi Tjong Jl. Raya Mandala Muli, Kel. Muli, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°30'49" LS dan 140°24'19" BT.	Hengi Tjong		NIB : 1295000310128 SIPJI 12950003101280009	Penerbit OSS	- Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
11	13 November 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di UD. Nur Jl. Polder Dalam III, Kel. Maro, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°29'16"LS dan 140°24'04"BT.	UD. Nur (Ahmad Fauzi)	Hiu Dan Pari	NIB : 912001009078 SIPJI : I- 31/I/KKP/2021	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
E. SATWAS SDKP SORONG							
12	06-November-2025	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dilaksanakan di CV. Fadil Nur Bahari yang beralamat di Jln. Pipit KM. 7.		Hiu Dan Pari	NIB : 9120306201719 SIPJI No : 84/I/KKP/2021 SAJI DN : 00920/SAJI/DN/LPSPL./2025. Tanggal, 19 Juni 2025,	Penerbit OSS	Pelaku usaha Dalam Hal distribusi/Pengiriman Jenis ikan dilindungi sudah dilengkapi dengan dokumen

		Gunung, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Koordinat 00°53.300'S- 131°17.290'E.					dan data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13	10-November-2025	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dilaksanakan di Pada Pelaku Usaha: Nawasir Asnawir yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Koordinat 00°51.390'S- 131°14.497'E.	Nawasir Asnawir	Hiu	NIB : 1245000660484 SIPJI No : B.160/I/LPSPL.1/PRL.430/1/2 025	Penerbit OSS	Hasil Pengawasan yang dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Sorong bahwa kegiatan Usaha pemanfaatan Jenis Ikan di Lindungi telah dilengkapi dengan dokumen PB dan PB UMKU;
14	12-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di JL. Perikanan Klademak II Pantai, Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. dengan titik Koordinat - 0°53'14,253''S131°15'15,16''E.	Hamzah	- Hiu dan Pari	NIB : 9120209470555 SIPJI No. 101/I/KKP/2021 SAJI : 01672/SAJI/DN/LPSPL.1/X/2 025 Tanggal 31 Oktober 2025	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
15	10-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Yos Sudarso No.59, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya 0°86'47,3811''S131°24'67,2689''E.	LINDA RUMFEKA	Hiu dan Pari	NIB : 8120011282972 SIPJI No. 81200112829720003 SAJI : 00859/SAJI/DN/LPSPL.1/VI/2 025 11 Juni 2025	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
16	10-November-2025	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilaksanakan pada tanggal 12 Bulan November Tahun 2025 di U D . J a y a M a n d i r i yang beralamat di Jl. Perikanan Klademak II Pantai, Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.	HERLINA (UD. Jaya Mandiri)	Hiu Dan Pari	NIB : 1204000212534 SIPJI No94/I/KKP/2021, SAJI : 01414/SAJI/DN/LPSPL.1/IX/2 02511 24 September 2025	Penerbit OSS	Hasil Pengawasan yang dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, melalui Satwas SDKP Sorong bahwa kegiatan Usaha pemanfaatan Jenis Ikan di Lindungi milik UD. JAYA MANDIRI telah dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha;
F. SATWAS SDKP MIMIKA							
17	10-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Perjuangan RT 016 RW 000 Timika Indah, Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik Koordinat 4.5447S 136.8794E.	Timmy Pantharey P. Manurung	- Hiu dan Pari	NIB : 2602250032223 SIPJI 20250414212258159924, SAJI B.699/LPSPL.1/PRL.430/VII/2 025, Tanggal 22 Juli 2025	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
18	11-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Perjuangan RT 016 RW 000 Timika Indah, Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik koordinat 4.4917S 136.8474E.	Marnata Evelin Manullang	- Hiu dan Pari	NIB : 2602250036161 SIPJI 202502261110462412189, SAJI B.699/LPSPL.1/PRL.430/VII/2 025, Tzanggal 22 Juli 2025	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
19	17-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Durian SP 2 RT 018 RW 000 Timika Jaya,	Charley Mark Paul Sirait	-- Hiu dan Pari	NIB : 1902250112472 SIPJI 202503200842184007720, SAJI B.699/LPSPL.1/PRL.430/VII/2 025,	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi

		Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan titik Koordinat 4,5666S 136.8764E.			Tanggal 22 Juli 2025		
G. WILKER PSDKP DOBO							
20	12-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Raja Sam, RT.022/RW.008, Kel/Desa Galai Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Aru Provinsi Maluku. dengan titik Koordinat 5'45'29"S 134'14'8"E.	(Bobby Agustinus) CV. Bobby Arafura Fishing Industries,	Hiu Lanjam, Pari dan Sirip Hiu	NIB : 8120313180026 SIPJI: I-20221111242324148545	Penerbit OSS	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaku usaha milik CV. Bobby Arafura Fishing Industries telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
21	11-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Rabiadjala RT.002 RW.004, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab.Aru Provinsi Maluku dengan titik koordinat 5'45'29'874"S 134'13'7'53"E.	Sahak Farizar	Hiu dan Pari,	NIB : 9120008132339 SIPJI: I-202211161146109664628,	Penerbit OSS	pengawasan bahwa pelaku usaha milik Sahak Farizar telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
22	11-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di D e s a S i w a l i m a , Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan Koordinat 5'45'33'96"S 134'13'8'982"E.	Efendi	Hiu Lanjam, Pari dan Sirip Hiu	NIB : 2909220002431 SIPJI: I-202209290726302575355,	Penerbit OSS	pengawasan bahwa pelaku usaha milik Efend itelah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
23	11-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di J l . U m a r A n a k o d a , Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan titik koordinat 5'45'34'596"S 134'14'13'05"E.	Renol Wisman	Hiu dan Pari,	NIB : 2909220002431 SIPJI: I-202303082048308405322,	Penerbit OSS	pengawasan bahwa pelaku usaha milik Renol Wisman telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
24	10-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Dusun Tanjung Marbali Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. dengan titik Koordinat (5°45'37.52"S - 134°13'55.20"E).	(Djap Adi Sumali) CV. Lucky Surya Timur	Hiu dan Pari,	NIB : 1605220005323 SIPJI : I-202302182116008178495,	Penerbit OSS	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaku usaha milik CV. CV. Lucky Surya Timur telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
25	10-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Kapitan Malongi, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau	Kona Anggrek CV. Citra Baru Dobo	Hiu dan Angrek	NIB : 8120019192034 SIPJI : I-202201101404013747029,	Penerbit OSS Penerbit OSS	pengawasan bahwa pelaku usaha milik Kona Anggrek CV. Citra Baru Dobo telah memiliki Perizinan Berusaha

		Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan titik koordinat 075°94,242"S – 134023'53,408"E.					KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
26	10-November-2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Ali Moertopo No. 125, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku	Rudi Wisman	- Pari Kikir - Hiu Sirip Hitam	NIB Nomor : 9120202301928 SIPJI-DN Nomor : 67/1/KKP/2021 SAJI-DN Nomor : 01044/SAJI/DN/LPSPL.1/V/2024 SAJI-DN Nomor : 01045/SAJI/DN/LPSPL.1/V/2024 SAJI-DN Nomor : 01289/SAJI/DN/LPSPL.1/VII/2024	Penerbit OSS	Kegiatan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi terhadap pelaku usaha Rudy Wisman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27	10-November-2025	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dilaksanakan di Pelaku usaha Iwan Sentono, Jl. Ali Moertopo No. 125, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan Koordinat 5°45'32,778"S 134°13'20,076"E.	Iwan Sentono	Hiu dan Pari	NIB: 1279000211876 SIPJI: I-I-202109021139213555841,	Penerbit OSS	Pelaku usaha dalam hal distribusi/Pengiriman Jenis ikan dilindungi sudah dilengkapi dengan dokumen dan data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
I. WILKER PSDKP FAK-FAK							
28	12 November 2025	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di CV. Irian Perkasa Indah berlokasi di Jl. Letda Dirwan Kelurahan Wagom Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Titik Kordinat 2 o55'36"S 132o17'48,942"E.	Zulfa Musa'ad (CV. Irian Perkasa)	- Pari Kupu-kupu - Pari Kikir - Pari Lontar - Hiu Lanjaman - Hiu Martil	NIB : 1219000322726 SIPJI : 62/1/KKP/2021 SAJI: B699/LPSPL.1/PRL.430/II/2025, Tanggal 22 Juli 2025	DPM PTSP	Pada bulan November 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi dan diperoleh hasil pengawasan bahwa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang dilakukan oleh CV. Irian Perkasa Indah dinyatakan taat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.



Gambar : 14 Pengawasan jenis ikan yang dilindungi

5 . Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran kegiatan ke lima menghasilkan 2 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya;

1. Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);

Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Pangkalan PSDKP Tual dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan 06 dan Kapal Pengawas Hiu 14, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 714, 715, dan 718

f. IKU 6: Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Pangkalan PSDKP Tual mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di WPP NRI 714, 715, dan 718. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp	= Indeks kinerja Kapal Pengawas
Bobot (%)	= Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	= Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target	= Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
- Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target tersebut diatas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM² (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian **96,80** dengan persentasi **105,22** % sampai dengan akhir tahun 2025 dari target Tahunan sebesar **92**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 33 Capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	92	96,80	96,32	96,88	92,92	-	89

Tabel. 34 Perbandingan IKU 6 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	95,00	97,10	96,80	96,8	93,95	94,01



Gambar : 15 Gelar operasi kapal pengawas

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai target. Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel. 35 Perhitungan capaian IKU 6

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Intercept Target Operasi (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (3%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon legal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker		
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV										
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai					
7	Pangkalan PSDKP Tual	KP. HIU MACAN 06	156	249	111,73	10	16	48,00	50,00	1,26	2,06	45,00	3	3	60,00	0	0	0,00	1,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	96,80	96,80
		KP. HIU 14	156	152	68,21	15	16	32,00	50,00	1,18	1,79	45,00	7	7	60,00	0	0	0,00	1,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	96,80	

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya maka hasil perhitungan yang dijabarkan pada tabel di atas masih harus dilakukan perhitungan rata-rata sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 6} = \frac{96,80+96,80+96,80+96,80}{4} = \frac{380}{4} = 96,8$$

Capaian indikator kinerja 2 selama tahun 2025 memperoleh hasil yang baik, itu dapat kita lihat dari capaian dari triwulan I hingga IV. Realisasi anggaran operasi kapal pengawas tahun 2025 sebesar Rp 12,874,723,582,- atau sekitar 84,10%. Realisasi ini tidak dapat berjalan optimal karena terhambat dengan dana PNBPN yang bersumber dari Ditjen Perikanan Tangkap yang dalam tahun 2025 seluruh biaya operasional kapal bersumber dari PNBPN. Terdapat pagu PNBPN tahap I yang tidak dapat digunakan sebesar Rp2.432.811.000,-. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi hari operasi kapal pengawas yang tidak dapat berjalan optimal. Realisasi hari operasi kapal pengawas Hiu macan 06 sebesar 52 hari dengan 249 KII hasil riksa dan 16 pemeriksaan kelautan serta melakukan ad hoc terhadap 2 KII, sedangkan kapal pengawas Hiu 14 dengan 52 hari dengan 152 KII hasil riksa dan 27 pemeriksaan kelautan serta melakukan ad hoc terhadap 1 KII.

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

1. **Dana PNBP Tahap I** yang dapat digunakan pada tanggal 04 Juli 2025 dengan nominal sebesar Rp**4.170.354.000,-**. Dana ini dapat digunakan membayarkan kebutuhan BBM kapal pengawas untuk mendukung hari operasi.
2. **Pemeriksaan melebihi target yang ditetapkan.** Pencapaian terhadap indeks kinerja operasi kapal pengawas salah satunya berasal dari target pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Kapal pengawas diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal perikanan per hari operasi dan 1 objek kelautan per periode operasi. Pemeriksaan yang melewati target menjadi salah satu aktualisasi sehingga dalam suatu periode operasi jika KP tidak mampu memenuhi target operasi dikarenakan cuaca dan faktor lainnya maka kelebihan dari target dapat menjadi semacam tabungan yang mengamankan perhitungan indeks kinerja pada komponen pemeriksaan kapal perikanan.
3. **Adanya kebijakan pimpinan yang strategis.** Kebijakan berupa peminjaman BBM dari KP yang lain antar Satker PSDKP maupun intern Pangkalan PSDKP Tual, sehingga dapat mengoptimalkan operasi kapal pengawas yang dapat memenuhi kinerja kapal pengawas ketika anggaran PNBP belum dapat digunakan sehingga capaian indikator kinerja setiap triwulannya dapat terpenuhi.
4. Menyusun rencana operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, pemeriksaan atas aktifitas pada Kawasan konservasi maupun data analisis SPKP;
5. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi berdasarkan peta kerawanan dan laporan masyarakat, terus mengupdate data kerawanan yang berbasis pelaporan maupun pemantauan;
6. Melakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat membantu dan menilai pada saat operasi dilaksanakan apa saja yang menyebabkan kegiatan operasi tidak optimal dan dapat menentukan langkah pencegahannya.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, diantara kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja adalah **Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas,** walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi merupakan aspek yang berjalan beriringan mendorong keberhasilan indeks operasi kapal. Pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta docking maupun

pembelian suku cadang direncanakan sematang dan sesuai kebutuhan kapal pengawasan sehingga operasi dapat berjalan optimal.

Walaupun dapat dikatakan bahwa Indeks kinerja kapal pengawas berhasil karena melebihi target tahunan yang ditetapkan, akan tetapi volume output yang dihasilkan tidak sesuai dari target yang ditetapkan. 104 hari operasi merupakan target setiap kapal yang dikelola Pangkalan PSDKP Tual. Beberapa faktor yang menyebabkan target hari operasi tidak tercapai antara lain;

- Seluruh anggaran operasional kapal pengawas, meliputi BBM, pelumas 100% bersumber dari PNBPN yang bergantung dari target capaian PNBPN Ditjen Perikanan Tangkap, hal ini menyebabkan Pangkalan PSDKP Tual harus melakukan kebijakan strategis sebagaimana telah diungkapkan pada point ke 3 analisa penyebab keberhasilan untuk memastikan indeks kinerja operasi kapal pengawas dapat dilakukan perhitungan setiap triwulannya;
- Anggaran operasional kapal pengawas baru dapat dimanfaatkan pada 04 Juli 2025, itu berarti Pangkalan PSDKP Tual baru memaksimalkan penyerapan anggaran dan kegiatan ops. KP pada semester II tahun 2025;
- Masih terdapat anggaran PNBPN sebesar Rp4.170.354.000,- yang tidak dapat direalisasikan karena anggaran tersebut belum diserahkan kepada Ditjen PSDKP, anggaran ini tetap mengendap sebagai total pagu yang menjadi variabel perhitungan realisasi kegiatan ops. KP.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini sesuai karena perhitungan anggaran dan target hari ops telah sesuai dengan realisasi yaitu 57 hari, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya mengarah kepada efisiensi terhadap kegiatan operasi antara lain;

- Memanfaatkan informasi pengawasan sebagai data awal dalam penentuan lokasi operasi sehingga operasi lebih terarah;
- Memanfaatkan VMS dalam menganalisa dugaan pelanggaran kapal perikanan;

g. IKU 7: Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk

membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.

3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- $TW I = TW I$
- $TW II = (TW I + TW II)/2$
- $TW III = (TW I + TW II + TW III)/3$
- $TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4$

Dalam kurun waktu tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Capaian yang diperoleh sebesar **95,00** dengan persentase sebesar **103,26 %** dari **target sebesar 92 pada tahun 2025**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel. 36 Capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	92	95,00	98,4	97,87	104,33	-	89

Tabel.37 Perbandingan IK 7 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
		IKU 7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)						
SK.5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	95,00	94,36	94,69	92,02	94,97	95,46

Selama tahun 2025 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 92. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 38 Perhitungan capaian IKU 7

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Tindak Lanjut Target Operasi (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
		TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV				
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi		
Pangkalan PSDKP Tual	Albacore 02	10	14	70,0	2	9	225,0	50,00	0,00010	0,00016	45,00	0	0	0,00	95,00	95,00		
	Marlin 14	7	17	121,4	2	11	275,0	50,00	0,00005	0,00006	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Napoleon 18	17	35	102,9	2	17	425,0	50,00	0,00011	0,00033	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Napoleon 25	5	11	110,0	2	0	0,0	50,00	0,00003	0,00006	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Napoleon 42	2	4	100,0	2	2	50,0	50,00	0,00001	0,00004	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Napoleon 49	2	3	75,0	2	2	50,0	50,00	0,00001	0,00002	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Napoleon 50	2	6	150,0	2	1	25,0	50,00	0,00001	0,00003	45,00	0	0	0,00	95,00			
	RIB/Sea Rider 010	23	54	117,4	2	28	700,0	50,00	0,00015	0,00046	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Rubber Boat	7	21	150,0	2	15	375,0	50,00	0,00005	0,00008	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Jetski 01	7	9	64,3	2	13	325,0	50,00	0,00007	0,00011	45,00	0	0	0,00	95,00			
	Jetski 02	7	8	57,1	2	14	350,0	50,00	0,00007	0,00012	45,00	0	0	0,00	95,00			

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya maka hasil perhitungan yang dijabarkan pada tabel di atas masih harus dilakukan perhitungan rata-rata sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 7} = \frac{95,00+95,00+95,00+95,00}{4} = \frac{380}{4} = 95$$

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan berdasarkan data pengawasan yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sesuai pola dan kebiasaan pada kurun waktu tertentu, sehingga wilayah operasi dapat disesuaikan dengan wilayah potensi pelanggaran berdasarkan waktu ideal terjadinya;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan berupa makanan, minuman, air bersih, maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi

armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;

2. Memenuhi kebutuhan logistic awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal;

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini dicapai dengan beberapa faktor diantaranya;

- Memanfaatkan informasi pengawasan sebagai data awal dalam penentuan lokasi operasi berdasarkan peta kerawanan;
- Validitas informasi intelijen dalam mengarahkan kegiatan operasi agar lebih efektif;
- Pengelolaan informasi terhadap pelaporan atau aduan masyarakat sehingga sebaran lokasi operasi menjadi jelas dan terukur.

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah sebesar Rp.410,988,411,- atau 99,99% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp.411,032,000,-. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Pangkalan PSDKP Tual selama tahun 2025 telah melaksanakan 89 hari operasi untuk 11 armada speedboat pengawasan (sesuai target) dan melaksanakan pemeriksaan kepada 182 KII hasil risiko dan pemeriksaan 112 objek pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan ad hoc namun pada tahun 2025 tidak ada kapal yang di ad hoc oleh armada speedboat sehingga dinyatakan nihil. Pangkalan PSDKP Tual berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 2 dalam kondisi siap terbatas.berikut realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel.39 Realisasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	OPS	KAPAL DIPERIKSA				DITANGKAP			KONDISI KAPAL
			KII	KIA	PWP3K	JML	KII	KIA	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ALBACORE 002	10	14	-	14	28	-	-	-	SIAP OPERASI
2	RIB 010	23	54	-	28	82	-	-	-	SIAP OPERASI
3	Jetsky 01	7	9	-	13	22	-	-	-	SIAP OPERASI
4	Jetsky 02	7	8	-	14	22	-	-	-	SIAP OPERASI
5	SP. NAPOLEON 050	2	6	-	1	7	-	-	-	SIAP OPERASI
6	SP. NAPOLEON 049	2	3	-	2	5	-	-	-	SIAP TERBATAS
7	SP. NAPOLEON 018	17	35	-	17	52	-	-	-	SIAP TERBATAS
8	SP. NAPOLEON 042	2	4	-	2	6	-	-	-	SIAP OPERASI
9	RUBBER BOAT	7	21	-	15	36	-	-	-	SIAP OPERASI
10	SP. NAPOLEON 025	5	11	-	-	11	-	-	-	SIAP OPERASI
11	SP.MARLIN 014	7	17	-	11	28	-	-	-	SIAP OPERASI
	Jumlah	89	182	-	117	299	-	-	-	

6 . Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan ke enam menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya;

1. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

h. IKU 8 : Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pangkalan PSDKP Tual memiliki 2 unit Kapal Pengawas dan 11 unit speedboat pengawasan yang dirawat dengan ketentuan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

Formula:

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

X_p = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

Tabel. 40 Capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	100	-

Tabel. 41 Perbandingan IKU 8 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IKU 8	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual(%)	100	100	100	100	100	100

Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian yang baik dengan melaksanakan perawatan baik preventif, prediktif, maupun darurat dengan baik dan dibuktikan realisasi atas kebutuhan perawatan serta adanya pelaporan tentang kegiatan perawatan yang dilakukan. IKU ini telah tercapai dan sesuai dengan target, akan tetapi data hanya dapat dibandingkan hingga tahun 2021 dikarenakan IKU dimaksud baru ditetapkan sejak 2021 hingga 2025. Capaian 100 pada IKU ini dikarenakan beberapa **analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

1. Memantau seluruh kebutuhan dan kesiapan operasi armada baik di Pangkalan PSDKP Tual maupun yang tersebar pada satwas dan wilker serta melaksanakan Upaya perawatan dengan skala prioritas dan mengatur kebutuhan penganggarnya dengan pembiayaan lewat mekanisme LS kontraktual, non kontraktual, ataupun swakelola dengan mekanisme GUP maupun TUP sehingga perawatan armada dapat dijalankan secara merata;
2. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi armada yang telah dilaksanakan perawatan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan evaluasi melalui capaian kegiatan PN bersama sesditjen PSDKP. Kegiatan evaluasi secara internal akan menguatkan kegiatan perawatan dikarenakan akan berdampak pada capaian hari ops dan kinerja armada sedangkan evaluasi ditingkat sesditjen akan memacu percepatan kegiatan perawatan apabila terdapat kerusakan karena data akan disandingkan dengan seluruh UPT lingkup ditjen PSDKP.

Realisasi atas kegiatan perawatan armada sebesar Rp.6,020,499,903,- atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp6,020,530,000,-. Terdapat juga beberapa kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan docking KP. Hiu Macan 06 dan KP. Hiu 14;
2. Melaksanakan pengadaan kelengkapan kapal pengawas;

3. Melaksanakan pengadaan sarana pendukung operasional kapal pengawas;
4. Pengadaan suku cadang mesin bantu;
5. Pengadaan suku cadang ME KP. Hiu 14;
6. Pengadaan suku cadang ME KP. Hiu Macan 06;
7. Penyediaan logistik kapal pengawas;
8. Perbaiki sistem kontrol mesin induk KP. Hiu 14.

Efisiensi penggunaan sumber daya telah sesuai antarag target dan pelaksanaan yaitu perawatan pada 13 armada. Indikator kinerja ini dicapai dengan beberapa faktor diantaranya;

- Melakukan kontrol terhadap progress pekerjaan secara berkala;
- Melakukan perencanaan yang matang sehingga meminimalisir kemungkinan kesalahan pekerjaan yang menyebabkan kerugian.

Dalam pelaksanaan kegiatan perawatan armada sering kali ditemukan adanya beberapa permasalahan, sejauh ini belum sampai pada taraf yang mengkhawatirkan akan tetapi cukup menghambat diantaranya:

1. Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual belum memiliki agen maupun toko yang menjual peralatan pendukung perawatan kapal secara lengkap;
2. Terdapat beberapa keperluan mesin yang tidak *ready stock* dan harus *indent*;
3. Biaya pengiriman besar serta memakan waktu yang lama.

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistik personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Pangkalan PSDKP Tual melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistik atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggung jawaban;

- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Pangkalan PSDKP Tual melalui tim kerja Prasarana, sarana dan operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;
- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini dicapai dengan beberapa faktor diantaranya bermitra dengan rekanan yang terpercaya dan mudah diakses di seluruh wilayah operasi sehingga perawatan dapat dilakukan dengan cepat;

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama Tahunan tahun anggaran 2025 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp1,770,194,000- atau sebesar 99,99% dari total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp1,770,006,269,-.

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)".

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).

Secara umum kegiatan pengenaan sanksi administratif dan pemeriksaan hasil analisis sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual dapat terealisasi

i. IKU 9: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk;

1. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Tabel. 42 kriteria indeks sanksi adm

<i>PERSENTASE</i>	<i>NILAI INDEKS MAKS</i>	<i>KRITERIA INDEKS</i>
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 100 atas IKU ini dapat menyelesaikan 81 kasus yang terdiri dari :

1. Sanksi administratif bidang sumber daya kelautan (SDK) sebanyak 23 kasus yang terdiri dari ,Peringatan Pertama (SP.1) sebanyak 20 kasus dan denda administratif sebanyak 3 kasus berdasarkan hasil ekspose dengan denda sebesar RP.95.009.800; untuk lebih jelas berikut kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 45 Rekap pengenaan sanksi administratif Sumber Daya Kelautan ekspose

NO	NAMA KAPAL/PERUSAHAAN	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF	NILAI DENDA
1	PT. KLASAMAN INDAH RAYA	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,878 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	Rp16.401.040
2	PT. SAGAWIN SENTOSA MARITIM	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,588 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	Rp.10.983.840
3	PT. PRO INTERTECH INDONESIA	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,894 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	RP.67.625
4	PT INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	Melakukan pelanggaran berupa tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	SP1	
5	PT SAMUDERA INDO SEJAHTERA			
6	PT BAGUS JAYA ABADI			
7	PT RAJAWALI LAUT TIMUR			
8	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1	
9	PT SUMA SARANA		SP1	
10	PT PAPUA RESORT		SP1	
11	JULIO FRANCO SUTRISNO		SP1	
12	PT AMERA NUS		SP1	
13	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1	
14	PT AMERA NUS		SP1	
15	PT RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1	
16	PT GOLDEN EKSPORINDO ABADI		SP1	
17	PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY		SP1	
18	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1	
19	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1	
20	PT. FREEPORT INDONESIA		SP1	
21	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1	
22	PT INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA		SP1	
23	PT SAMUDERA INDO SEJAHTERA		SP1	
TOTAL				Rp95.009.800

2. Sanksi administratif bidang sumber daya kelautan (SDP) Sebanyak 58 kasus yang terdiri dari Peringatan Pertama (SP.1) 17 kasus, Peringatan kedua (SP.2) sebanyak 1 kasus dan denda administratif sebanyak 39 kasus berdasarkan hasil ekspose dengan denda administratif sebesar Rp**2.431,059,800,-**. Tujuh Belas kapal diantaranya merupakan kapal yang di adhoc oleh kapal pengawas dan tiga puluh kapal lainnya adalah hasil pemeriksaan pengawas perikanan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel. 43 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	81	81	80	80	-	-	-

Capaian IKU 9 = $\left(\frac{12}{12}\right) \times 100\% = 100\%$ (81 mengacu kriteria indeks) (baik)

Capaian IKU 9 = $\frac{TW I+TW II+TW III+TW IV}{4} = \frac{81+81+81+81}{4} = \frac{324}{4} = 81$

Tabel. 44 Perbandingan IK 9 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	IKU 9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	81	81	81	81	81	81

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Analisa kegiatan yang menunjang adalah Kegiatan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan pada saat kedatangan terkait adanya dugaan penggunaan alat tangkap ganda dan akhirnya berhasil memberikan satu sanksi administratif. Pelaksanaan patroli pengawasan kelautan dan perikanan oleh kapal pengawas yang secara rutin dilaksanakan dalam mengawal ketaatan pada saat melaksanakan pengoperasian pasca terbitnya SLO.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah Kegiatan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan pada saat kedatangan terkait adanya dugaan penggunaan alat tangkap ganda dan akhirnya berhasil memberikan satu sanksi administratif. Pelaksanaan patroli pengawasan kelautan dan perikanan oleh kapal pengawas yang secara rutin dilaksanakan dalam mengawal ketaatan pada saat melaksanakan pengoperasian pasca terbitnya SLO. Kedua aktifitas tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan berjalan dengan baik saat pelaksanaan operasi maupun setelah kedatangan kapal perikanan. Kegiatan ini berhasil memperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 67,835,000,- atau 99,99% dari total anggaran Rp67,841,000,-.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini dicapai sebagaimana telah dijelaskan bahwa jaringan informasi secara internal yang merupakan bagian dari faktor penunjang keberhasilan juga merupakan bagian dalam efisiensi sumber daya dalam melaksanakan pengawasan sehingga indikasi pelanggaran dapat lebih cepat dideteksi dan ditindaklanjuti. Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual menargetkan 5 kasus sanksi administratif

dengan realisasi 81 kasus, namun berdasarkan hasil realisasi capaian justru melampaui target secara signifikan jika di hitung target awal hanya 5 kasus hanya setara dengan 6,2 % dari realisasi yang di capai sehingga menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Tual melampaui target hingga 16 kali lipat sehingga output kerja dapat di nyatakan 99,99% dengan nilai efisiensi 0,009 %.

Tabel. 47 Nilai efisiensi sanksi administratif

No	Output Program	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA - COP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (6) - (7)
2351.QIC 003	Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	5	81	99.99%	67.841.000	67.835.022	67.834.215	5.978
TOTAL					67.841.000	67.835.022	67.834.215	5.978

Catatan : Nilai efisiensi sebesar Rp 5,978 dari pagu anggaran Rp 67,841,000 adalah 0.009%.

j. IKU 10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

- x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;
 $x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;
 n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Tabel. 48 kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 164 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 49 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUT		TINDAK LANJUT						Capaian Pengukuran Sanksi Administratif SPKP		
		TRANSKIPMEN T	PELARUHAN PANGKALAN	DR	JALUR (<12 NM)	ZONA KONVERSI/AS	POACHING	SIREP/PIRED	JUMAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	SUKAR PELANGGARAN	BAP	SPL	SP2	DENDA	%	Kriteria Indeks (lihat tabel)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Tual	4	22	56	71	10	1	0	164	14	150	23	28	6	84	5	4	91,46%	81	
Total		4	22	56	71	10	1	0	164	23	150	23	28	6	84	5	4	91,46%	81	

$$\text{Capaian IKU 10 } x = \frac{150}{164} \times 100\% = 0,91 \times 100 \% (91,46 \text{ Baik})$$

$$\text{Capaian IKU 10} = \frac{\text{TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}}{4} = \frac{81 + 81 + 81 + 81}{4} = \frac{324}{4} = 81$$

Tabel. 50 Capaian IK 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	81	81	80	58,99	-	-	-

Tabel. 51 Perbandingan IK 10 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.7	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	81	81	81	81	81	81

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual menyurati UPT Pangkalan PSDKP lainnya yang merupakan tempat dimana pemilik kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdomisili. Surat tersebut dimaksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan bantuan dari UPT PSDKP lainnya sebagai mediator agar kegiatan BAP dapat dilaksanakan;
3. Pangkalan PSDKP Tual mendelegasikan beberapa orang pengawas untuk melaksanakan BAP terhadap pemilik kapal yang diduga melakukan pelanggaran SPKP pada Pangkalan PSDKP Jakarta.

Indikator kinerja ini memerlukan perhatian ekstra untuk dapat diselesaikan mengingat dugaan pelanggaran yang setiap hari akan bertambah dan kedudukan kapal ketika berlabuh belum tentu pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Keterlibatan UPT lain juga sangat membantu walaupun sebenarnya belum bisa berjalan dengan optimal mengingat tidak tercapainya waktu yang ideal bagi kedua belah pihak melakjukan BAP dikarenakan perbedaan waktu dan UPT PSDKP mitra juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Mengingat dugaan pelanggaran setiap harinya terus bertambah maka berdasarkan evaluasi internal maka Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun menyurat kepada UPT PSDKP lainnya agar membantu sebagai mediator terlaksananya proses BA permintaan keterangan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini dicapai dengan cara antara lain menggunakan aplikasi zoom untuk meminimalisir jarak antara kuasa pemilik kapal agar dapat dengan mudah dilaksanakan berita acara permintaan keterangan atas dugaan pelanggaran.

8. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas

Sasaran kinerja ke delapan ini menurunkan 1 indikator kinerja yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama yang merupakan salah satu tugas utama Pangkalan PSDKP Tual dalam rangka penegakan hukum. IKU yang dimaksud adalah "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)".

k. IKU 11: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

Xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual berhasil menuntaskan satu kasus penyidikan hingga tahap P-21, yaitu perkara KM. FB. LB. RASHELL-107. Kasus ini bermula ketika KP. ORCA 04 melaksanakan patroli rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 Samudera Pasifik. Pada saat patroli, kapal mendeteksi secara virtual sebuah target pada posisi koordinat 03°49'630" LU – 135°59'776" BT yang teridentifikasi sebagai kapal ikan. setelah dilakukan pendekatan dan pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama FB. LB. RASHELL-07, yang merupakan kapal perikanan jenis Light Boat. hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal tersebut beroperasi di perairan Indonesia (WPPNRI 717) tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, kapal kemudian di-*ac hoc* ke Satwas SDKP Sorong untuk proses serah terima dari KP. ORCA 04 kepada Pangkalan PSDKP Tual. Selanjutnya, Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti kasus ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dan melaksanakan rangkaian proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan berjalan efektif hingga akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan. Dengan demikian, capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, sekaligus memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

Tabel. 52 Capaian IK 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	94	100	100	93	93	-	-

Tabel. 53 Perbandingan IK 11 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
		IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)						
SK.8	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan IKU ini antara lain adalah:

- Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki jumlah personal PPNS yang memadai yang berperan aktif dalam penyelesaian TPKP di lingkup Pangkalan PSDKP Tual;
- Sinergitas antara pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K dengan PPNS masih terbina dengan baik sehingga proses dan alur TPKP dapat terjaga dengan baik;
- Tim kerja PP dapat mengoptimalkan semua sumber daya baik PPNS dan NON PPNS dalam menyelesaikan TPKP dimulai dari mindik, barbuk, saksi, pelaku, dan semua aspek yang terkait dalam penyidikan;
- Pendekatan kekeluargaan yang digunakan dalam manajemen konflik antara tersangka dan keluarga dapat dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Adapun **analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** adalah:

- Perhitungan kebutuhan SDM, pendelegasian, dan penjurusan pegawai yang dilakukan Pangkalan PSDKP Tual dengan mendistribusikan staffnya dalam keikutsertaan sebagai Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Polsus, dan PPNS terbukti berjalan baik dalam mengganti kekosongan personil dikarenakan mutas, maupun pemekaran organisasi sebelumnya sehingga kebutuhan aparat penegak hukum dalam organisasi tidak mengalami penurunan ataupun kekosongan;
- Perencanaan terhadap kebutuhan anggaran menjadi salah satu point yang menunjang hampir setiap aspek kinerja termasuk dalam TPKP. Perhitungan akan kebutuhan anggaran atau revisi terhadap kebutuhan menjadi jantung dalam keberhasilan kegiatan yang terkait erat dengan kebutuhan anggaran.

Sepanjang tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan TPKP dengan realisasi anggaran sebesar Rp24,089,00,- atau sebesar 99,99% dari total pagu Rp24,086,902,-.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja ini dicapai dengan cara antara lain adalah dengan melibatkan ahli dari pihak eksternal untuk melakukan pembuktian terhadap perkara tindak pidana perikanan. Pangkalan PSDKP Tual berhasil merealisasikan 1 kasus TPKP sesuai dengan target yang ditetapkan.

9 : Tata kelola pemerintahan yang efektif,lincah akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 10 indikator kinerja tersebut antara lain:

- 1.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
- 2.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup PSDKP Tual;
- 3.Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
- 4.Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual:
- 5.Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
- 6.Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
- 7.Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
- 8.Nilai Pengawasan Kersipan Internal Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
- 9.Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
- 10.Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;

Selama kurun waktu 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah merealisasikan anggaran sebesar Rp17,537,571,000,atau sebesar 99,99% dari total pagu Rp16,431,164,726,- pada kegiatan dukungan manajemen. 10 IKM dimaksud merupakan bentuk kinerja yang harus dijalankan atas kegiatan dukman.

I. IKU 12: Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

1. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian Indikator Kinerja Program pada level Unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L; dan

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh capaian sebesar 87,08 berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan eselon I. Hasil ini telah melewati target yang ditetapkan. Sejatinnya Analisa keberhasilan raihan ini dikarenakan **organisasi sudah mempertahankan Pembangunan zona integritas sebagai bagian dari sistem organisasi yang berjalan**. Secara lazim ketika PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 telah dijalankan maka sebagian besar aspek dalam roda organisasi menjadi aspek penilaian yang berhubungan menjadi penunjang capaian IKU dimaksud. **Kegiatan yang menunjang** kebutuhan organisasi akan sistem yang terukur menjadi landasan internalisasi ZI dalam aktifitas keseharian dikarenakan outout ZI dapat digunakan dan beririsan dengan pemenuhan kebutuhan organisasi organisasi akan sistem yang terukur menjadi landasan internalisasi ZI dalam aktifitas keseharian dikarenakan outout ZI dapat digunakan dan beririsan dengan pemenuhan kebutuhan organisasi lainnya

Tabel. 54 Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	71,5	91,36	74,86	-	-	-	-

Tabel. 55 Perbandingan IKU 12 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 12	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	74,86	95	97,53	93,67	88,79	75

j. IKU 13: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2025 sebesar 93.39 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. **Pada Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan nilai IKPA sebesar 93,39 dan tidak memenuhi target yaitu 92,00, nilai ini menurun dari tahun 2023 sebesar 92,82. Penurunan capaian ini karena**

Pangkalan PSDKP Tual memiliki deviasi antara RPD dan realisasi yang cukup besar, sehingga adapaun rencana perbaikan antara lain

1. Melakukan rapat evaluasi atas capaian RPD dengan semua unit ketua tim kerja;
2. Melakukan perhitungan prognosa RPD yang sesuai untuk dijalankan;
3. Menjaga deviasi masih dalam batas normal.

Tabel. 56 Capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	86.36	96.77	100.00	100.00	84.16	90.67	93.39	100%	0.00	93.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.35	10.00	10.00	8.42	22.67				
					Nilai Aspek	93.18		95.23			90.67					

Tabel. 57 Capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	92	93,39	93,76	92,82	94,82	93,05	90

Tabel. 58 Perbandingan IK 13 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
		IKU 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual						
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	93,39	94,16	96,50	97,40	96,04	94,23

k. **IK 14 : Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. **Pada tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual memperoleh capaian sebesar 83,22 dari target 81. Analisa keberhasilan capaian ini adalah:**

1. Mengkomunikasikan dan mendelegasikan semua staff Pangkalan PSDKP Tual agar terlibat pada kegiatan yang mendukung dan memperbaiki kompetensi pegawai, baik secara daring maupun luring;
2. Melibatkan pimpinan dalam *controlling* peningkatan IP ASN yang esensinya adalah memenuhi kebutuhan pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri dengan diklat 20 JP.

Pangkalan PSDKP Tual telah berhasil melewati target yang ditetapkan akan tetapi capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Penurunan disebabkan terdapat beberapa pegawai yang tidak memenuhi hak dan kewajiban untuk mengikuti diklat 20 JP. Selain itu pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual secara mandiri mengadakan kegiatan diklat dengan mengundang widyaiswara KKP dari BDA Sukamandi, terobosan ini dapat menjadi konklusi sehingga capaian diklat 20 JP staff dapat terpenuhi. Pemenuhan diklat bukan hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi IK akan tetapi merupakan hak untuk mendapatkan peningkatan kompetensi. Kondisi ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pemenuhan IK dimaksud tahun mendatang.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan ialah evaluasi capaian IP ASN pada semester I dan tahunan sehingga pimpinan dapat memantau progress kenaikan dan siapa saja yang belum melaksanakan diklat 20 JP.

Tabel. 59 Capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	81	83,32	88,63	90,63	81,21	82,07	76

Tabel. 60 Perbandingan IK 14 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo

SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 14	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	83,22	83,33	84,29	82,96	85,64	82,01
-------------	--	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

I. IKU 15: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Dalam penilaian mandiri SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2025 ada empat aspek yang dinilai yaitu:

- Aspek perencanaan
- Aspek pengukuran
- Aspek pelaporan
- Aspek evaluasi

Dimana hasil pengukuran merupakan pemenuhan data LKE pada aplikasi kinerjaku dengan upload bukti dukung yang sesuai kriteria penilaian. Ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai **86,2 dengan target 86. Analisa keberhasilan** terhadap IKU ini dikarenakan

1. Pemenuhan data dukung sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap koreksi ketika self assessment.

Sedangkan analisa kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah

1. Kegiatan perencanaan kinerja Pangkalan PSDKP Tual, baik berupa dokumen maupun kegiatan rapat;
2. Kegiatan pengukuran, seperti penginputan capaian pada aplikasi kinerjaku, bukti asistensi penilaian;
3. Pelaporan kinerja Pangkalan PSDKP Tual;

Kegiatan evaluasi penilaian capaian kinerja

Tabel. 61 Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	86	87,50	86,2	82,65	-	-	87,75

Tabel. 62 Perbandingan IK 15 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo

SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	87,50	90,00	87,85	90,00	87,80	88,40
------	---	--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

m. IKU 16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada tahun 2025**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dan

telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel.63 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	-	-	-

Tabel.64 Perbandingan IK 16 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	100

$$\text{Capaian IK 16} = \frac{12}{12} \times 100 = 100$$

$$\text{Capaian IK 16} = \frac{\text{TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}}{4} = \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} = \frac{400}{4} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

n. IKU 17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IK "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan UPT PSDKP Tual yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan". Selama tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual memiliki rekomendasi hasil sebanyak 7 rekomendasi yang harus ditindak lanjuti, berdasarkan surat SESDITJEN PSDKP Nomor 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026 tanggal 09 Januari 2026. Pangkalan PSDKP Tual telah menindaklanjuti 7 rekomendasi tersebut sehingga capaian Pangkalan PSDKP Tual untuk indikator kinerja dimaksud adalah 100%. Perhitungan capaian tahunan merupakan rata-rata capaian setiap triwulan yang dirata-ratakan.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Capaian tahun 2024 akan kami tampilkan dalam tabel berikut

Tabel.65 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	100	100	100	-	80

Tabel.66 Perbandingan IK 17 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan

pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindaklanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

o. IKU 18: Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Tahunan Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 99,01 dari target 88,5.

capaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Pangkalan PSDKP Tual serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa. Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel.67 Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	88,5	99,01	100	99,29	90,61	91,73	-

Tabel.68 Perbandingan IK 18 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 18	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	99,01	92,99	92,14	94,21	91,44	93,12

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dala melaksanakan pelayanan.

p. IKU 19: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

Nilai pengawasan kearsipan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP sama dengan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan nilai kearsipan sebesar 86,50 dari target 80.IKM pengawasan kearsipan baru ditetapkan menjadi indeks kinerja yang termuat menjadi perjanjian kinerja pada tahun 2025 sehingga IKM ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kendati baru menjadi indikator kinerja pada tahun 2025 tetapi penilaian telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pencapaian sebesar 83,75. Penurunan capaian ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Tual belum memiliki JF Arsiparis, dimana unsur tersebut merupakan salah satu kriteria penilaian yang harus dipenuhi.

Analisa penyebab keberhasilan antara lain:

- Pangkalan PSDKP Tual telah merapikan penataan arsip dengan kodefikasi yang rapi dan lebih tertata;
- Telah melakukan penertiban terhadap penomoran surat yang bersumber dari satu pintu;
- Aktif menyesuaikan kondisi arsip Pangkalan PSDKP Tual dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemusnahan terhadap arsip yang tidak terpakai dengan maksud mengefisienkan gudang penyimpanan arsip.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan pembinaan dukungan manajemen berupa pengarahan yang dilaksanakan oleh kepala subbagian umum terkait pemenuhan kebutuhan organisasi

Tabel.69 Capaian IK 19

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	75	86,50	82,7	-	-	-	-

Tabel.70 Perbandingan IK 19 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86,50	88,50	84,90	92,50	88,50	91,75

q. **IKU 20: Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, replikasi, khusus

Pangkalan PSDKP Tual berhasil menghasilkan 1 buah inovasi pelayanan publik yang merupakan fitur tambahan untuk melengkapi inovasi kami sebelumnya yaitu Tim Panther 06. Fitur tersebut diberi nama SEDAP (sistem informasi pengenaan denda administratif di bidang kelautan dan perikanan). Fitur ini dikembangkan dengan maksud sebagai tindak lanjut dan komitmen Pangkalan PSDKP Tual dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan dari IK ini adalah komitmen PSDKP Tual untuk mengkampanyekan meningkatkan fungsi pengawasan, pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja, sebagai saluran komunikasi bagi nelayan dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan masukan dimana sebelumnya Pangkalan PSDKP Tual menjadi salah satu perwakilan KKP dalam pelayanan yang prima dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan tahun 2025, pada kesempatan tersebut Pangkalan PSDKP Tual memperoleh predikat baik dengan persentase 84,72 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan inovasi aplikasi SEDAP (sistem informasi pengenaan denda administratif di bidang kelautan dan perikanan) untuk memberikan pelayanan yang prima dan transparan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan standar pelayanan, berikut aplikasi pelaporan internal pangkalan PSDKP Tual juga dibuat sehingga dapat dengan mudah diakses oleh para nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah pelayanan publik Pangkalan PSDKP Tual. Berikut kami sajikan datanya dalam bentuk tabel.

Tabel.71 Capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1	84,72	1	1	1	1	1

Tabel.72. Pebandingan IK 20 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
		IKU 20	Nilai pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)						
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 20	Nilai pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	84,72	82,00	80,07	76,00	84,90	83,28

r. **IK 21: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja

Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Formula:

$$N = \sum n$$

N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Pangkalan PSDKP Tual

n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

Penilaian terhadap IKU ini diperoleh capaian sebesar 76,626 atau 106,47%. IKU ini dinilai dengan LKE yang dipandu oleh pihak sesdit PSDKP. Penilaian optimal yang didapat dikarenakan ke 12 aspek yang dijadikan indikator telah dilaksanakan dengan baik

Analisa keberhasilan indeks kinerja ini adalah

- Internalisasi point budaya kerja dalam kegiatan organisasi baik dalam apel pagi maupun dengan kegiatan dan menjadi bagian sistem.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah

- Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mengimplementasikan budaya kerja;
- Memberikan reward bagi pegawai yang memahami nilai budaya kerja.

Terdapat perubahan target dari 21 menjadi 70. Perubahan target ini kemudian disesuaikan dalam PK. Berikut kami sajikan data capaian beberapa tahun terakhir dalam tabel, perbedaan nilai yang jauh bukan dikarenakan perbedaan kualitas capaian melainkan hanya terjadi perubahan target.

Tabel.73 Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	70	76,62	77,57	29,84	26,66	-	-

Tabel.74 Perbandingan IK 21 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
		IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual						
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	76,62	81,38	78,52	73,19	75,71	75,63

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan OMSPAN sebesar **91,91%** atau sebesar Rp**32,828,943,648,-** (*Tiga puluh Dua miliar Delapan ratus Dua puluh Delapan juta Sembilan ratus Empat puluh tiga ribu Enam ratus Empat puluh Delapan rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**35.716.696.000,-** (*Tujuh puluh miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), dimana terdapat PNBP pada TA. 2025 sebesar Rp**6.603.165.000,-** (*Tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*). Pagu yang bersumber dari PNBP hanya dapat dimanfaatkan melalui PNBP Tahap I sebesar Rp**4.170.354.000,-**, pada tanggal 04 Juli 2025, sehingga terdapat Pagu PNBP sebesar Rp**2.435.811.000** yang tidak dapat direalisasikan. Jika dihitung berdasarkan pagu existing tanpa PNBP dan AA yang belum dapat digunakan maka pagu Pangkalan PSDKP Tual sebesar Rp**29,113,531,000,-** sehingga realisasi selama tahun 2025 sebesar **99,99 %**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai dengan akhir Tahun 2025 kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Program dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dengan total 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja tahun berjalan. Hasil penilaian menunjukkan pencapaian IKU Tahunan dengan nilai NKO sebesar 106,50 % yang merefleksikan capaian di atas target. Dari 21 Indikator Kinerja tersebut, sebanyak 6 IKU memperoleh predikat biru (istimewa) dan 15 IKU lainnya berstatus hijau, sehingga secara keseluruhan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program efektivitas manajerial serta komitmen UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam mendukung penguatan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta dalam rangka meningkatkan kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual pada periode Triwulan I Tahun 2026, disarankan agar dilakukan penguatan koordinasi internal dan eksternal optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi berkala. Selain itu direkomendasikan agar UPT Pangkalan PSDKP Tual terus mendorong inovasi dalam pengawasan memperkuat kapasitas sumber daya manusia

serta memperluas keterlibatan masyarakat pengawas (Pokmaswas) sehingga pencapaian indikator kinerja dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

1. Saran dan Perbaikan dalam rangka menjaga konsistensi kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program disarankan agar UPT Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan kontrol secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengendalian ini perlu dilakukan melalui pemantauan rutin, evaluasi progress serta tindak lanjut atas temuan yang muncul sehingga setiap deviasi dapat segera diperbaiki. Dengan demikian capaian IKPA dapat terus berada pada jalur yang optimal dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara menyeluruh.
2. Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2025 adalah melaksanakan rapat evaluasi pada setiap periode Triwulan I s/d Periode Triwulan IV di Tahun 2026.

Lampiran



1. Penghargaan. Juara 2 Lomba Foto dalam rangka HUT Bulan Bhakti Ditjen PSDKP Tahun 2025



2. Penghargaan Juara 2 Lomba Video dalam rangka HUT Bulan Bhakti Ditjen PSDKP Tahun 2025



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

Jalan bukit Dumar No.1 Komplek PPN TUAL Kotamadya Tual 97651